

**RENSTRA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016 – 2021
PERUBAHAN**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS
2019**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang telah dilakukan perubahan indikator dan program prioritas serta strategis.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan menyusun Perubahan Renstra dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang telah dilakukan evaluasi pada Tahun 2018.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten. Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program di tingkat Eselon III dan Rencana Aksi Kegiatan di tingkat Eselon IV serta ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja pada tiap tahapan pelaksanaan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Semoga Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 Perubahan ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Amiin.

Bengkalis, Juli 2019



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkalis

dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Tingkat I
NIP. 19740220 2003121007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal	
Daftar Isi	i	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR /Kpts/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 280/Kpts/2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2021.	ii iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasam Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	
2.1	Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi	9
2.2	Sumber Daya Kesehatan	34
2.3	Kinerja Pelayanan Kesehatan	36
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	53
2.5	Analisis Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	62
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	65
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis	68
3.3	Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau	
3.4	Isu – Isu Strategis	71
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Visi dan Misi	81
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kesehatan	85
BAB V	STATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategis	96
5.2	Arah dan Kebijakan	97
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program Dan Kegiatan	96
6.2	Rincian Rencana Program Prioritas RPJMD	97
6.1	Rincian Rencana Program Prioritas Organisasi Perangkat Daerah	124

BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.	
	7.1 Indikator Kinerja Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	129
	7.2 Indikator Kinerja Renstra Mengacu Pada Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan	132
	7.3 Indikator Kinerja Utama	138
BAB VIII	PENUTUP	142



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS KESEHATAN

Jalan Pertanian No.- Telepon : 0766 – 8001006, website : diskes.bengkalis.kab.go.id
BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : /Kpts/VII/2019

Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS Nomor : 280/Kpts/XII/2016

Tentang

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah lebih terarah di bidang kesehatan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021, perlu disusun Perubahan Indikator Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan perubahan indikator sasaran dari tujuan, kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Indikator dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal Juli 2019



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS,

dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Tingkat I
NIP. 19740220 200312 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan taktis – strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat Visi dan Misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

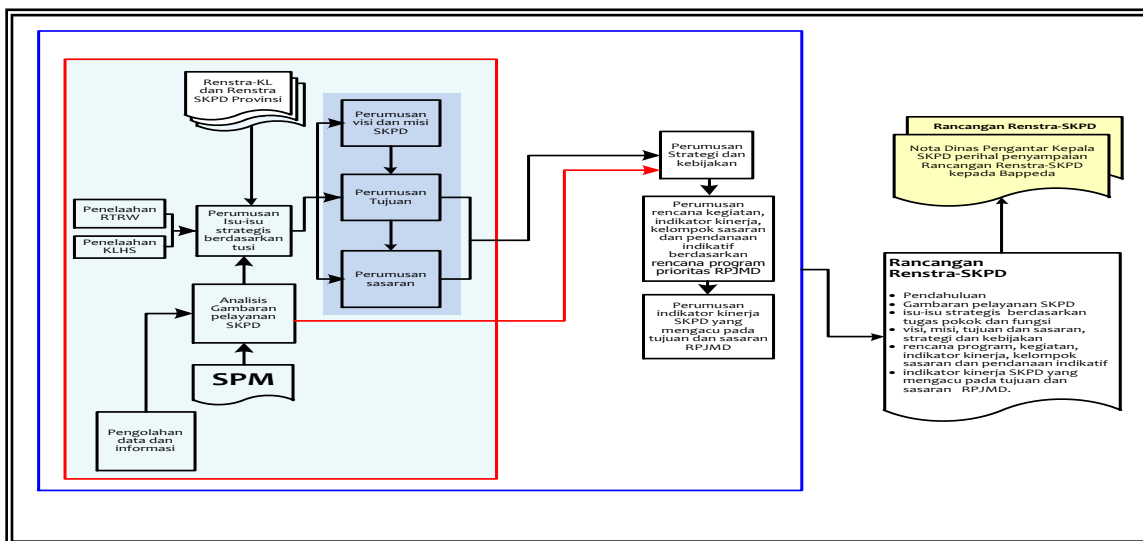
Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup Perangkat Daerah. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 dan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV

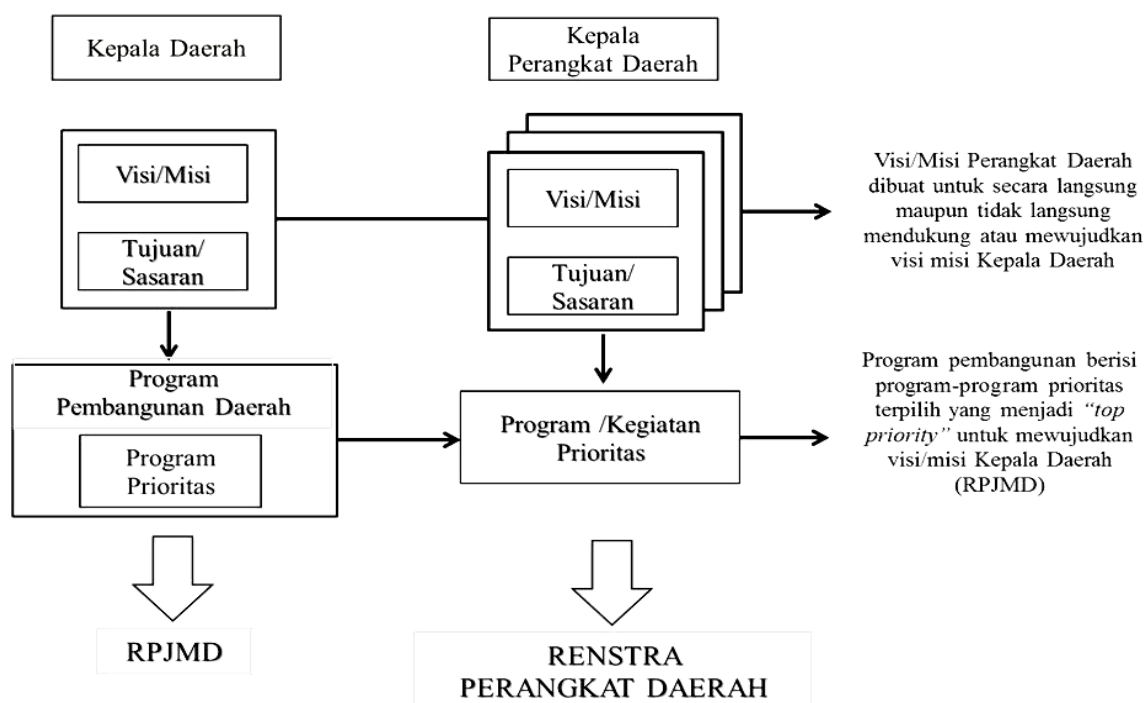
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis juga sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 (Kepmenkes RI No.HK.02.02/Menkes/512/2015), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019 (Perda Nomor 7 Tahun 2014), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu 2001-2025. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkulu 2016 – 2021 yang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 selanjutnya setiap Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program selama 5 tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkulu yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2016-2021. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu ini dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021 seperti pada Gambar 1.2

Gambar 1. 2

Keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 ini tetap mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Oleh karenanya lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan (5) pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Visi Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11)
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 38)

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun kedepan;
2. Untuk menyesuaikan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah;
3. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dilakukannya Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 urusan kesehatan sehingga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
3. Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021.

Disamping itu Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan evaluasi yang penting agar pembangunan berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kesehatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Indikatif Pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN

Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab ini diuraikan Penetapan Indikator Kinerja Utama.

BAB VIII PENUTUP.

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala, mempunyai tugas ;
 1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
 2. Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
 - a) Perumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - c) Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan

- f) Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Kesehatan;
 - c) Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
 - d) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - f) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

c. Sub Bagian Penyusunan Program

1. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Program dan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Penyusunan Program;
- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;
- d) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah ;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program;
- f) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g) Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
- i) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;

- j) Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- k) Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- l) Mengupayakan APBD Perubahan (APBD-P) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak dan tidak dilaksanakan sebelumnya;
- m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- n) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat;

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis, serta layanan dibidang Hukum, Kepegawaian dan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Umum berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan ;
- d) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah ;
- e) Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya ;
- f) Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas ;
- g) Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor ;
- h) Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas ;
- i) Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat ;
- j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan

- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis, serta layanan dibidang Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan ;
 - b) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan ;
 - c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
 - d) Mencari, mengumpulkan, menghimpun mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan ;
 - e) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah ;

- f) Mengusulkan kepada Sekretaris tentang peninjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g) Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- h) Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- i) Melakukan pengawasan terhadap inventarisasi barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR);
- j) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- k) Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- m) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
 - a) Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - b) Melaksanakan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - c) Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan penanggulangan masalah gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan penanggulangan masalah gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
 - c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu kecukupan gizi,

kewaspadaan gizi, dan penanggulangan masalah gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;

- d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan penanggulangan masalah gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merumuskan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b) melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi

dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;

- d) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

- a) Merumuskan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga, termasuk penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan *post market* produk makanan dan minuman industri rumah tangga;

- b) Melaksanakan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga dan pengawasan *post market* produk makanan dan minuman industri rumah tangga;
- c) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga termasuk penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan *post market* produk makanan dan minuman industri rumah tangga;
- d) Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga termasuk penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan *post market* produk makanan dan minuman industri rumah tangga;
- e) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga termasuk penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan *post market* produk makanan dan minuman industri rumah tangga; dan

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya(NAPZA);
 - c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan

penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Seksi Surveilans dan Imunisasi.

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan;
2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus;
 - c) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus; dan
 - d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah, imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus; dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit menular vektor, dan penyakit zoonotik;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, dan penyakit zoonotik;
 - c) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, dan penyakit zoonotik; dan
 - d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, dan penyakit zoonotik;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 - b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 - c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); dan

- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Bidang Pelayanan Kesehatan
- 1. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan dibidang Pelayanan Kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan dibidang Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Kesehatan Komplementer/ Penunjang.
 - 2. Bidang Pelayanan Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Merumuskan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/penunjang;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/ penunjang;
 - c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/ penunjang;
 - d) Melakkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/ penunjang;

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Seksi Kesehatan Primer dan Penunjang
- 1. Seksi Kesehatan Primer dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer dan penunjang meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yaitu : pelayanan kesehatan jemaah haji, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, dan peningkatan mutu pelayanan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang ada di kabupaten serta penerbitan izin balai pengobatan, klinik, rumah sakit kelas C dan kelas D;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yaitu : pelayanan kesehatan jemaah haji, kesehatan mata,

kesehatan gigi dan mulut, dan peningkatan mutu pelayanan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang ada di kabupaten serta penerbitan izin balai pengobatan, klinik, rumah sakit kelas C dan kelas D;

- c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yaitu: pelayanan kesehatan jemaah haji, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, dan peningkatan mutu pelayanan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang ada di kabupaten serta penerbitan izin balai pengobatan, klinik, rumah sakit kelas C dan kelas D;
- d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yaitu: pelayanan kesehatan jemaah haji, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, dan peningkatan mutu pelayanan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang ada di kabupaten serta penerbitan izin balai pengobatan, klinik, rumah sakit kelas C dan kelas D; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Dasar baik secara tertulis maupun lisan sesuai

dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan;

p. Seksi Kesehatan Rujukan

1. Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rincian Tugas tersebut sebagai berikut :
 - a) Merumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
 - c) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
 - d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan;

q. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan, standar pelayanan dan manfaat serta analisis pembiayaan dan kepesertaan serta fasilitas pelayanan dasar dan rujukan;
 - b) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan dan jaminan standar pelayanan dan manfaat serta analisis pembiayaan dan kepesertaan serta fasilitas pelayanana dasar dan rujukan;
 - c) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan dan jaminan standar pelayanan dan manfaat serta analisis pembiayaan dan kepesertaan serta fasilitas pelayanana dasar dan rujukan;
 - d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan standar pelayanan dan manfaat serta analisis pembiayaan dan kepesertaan serta fasilitas pelayanana dasar dan rujukan;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan;

r. Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia

kesehatan termasuk penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan.

2. Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
 - c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
 - d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan

fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

s. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendayagunaan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian, yaitu penerbitan izin apotek, toko obat serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan pendayagunaan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian, yaitu penerbitan izin apotek, toko obat serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - c) Memberikan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pendayagunaan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian,

yaitu penerbitan izin apotek, toko obat serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan di bidang perencanaan dan pendayagunaan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian, yaitu penerbitan izin apotek, toko obat serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

t. Seksi Alat dan Fasilitas Kesehatan

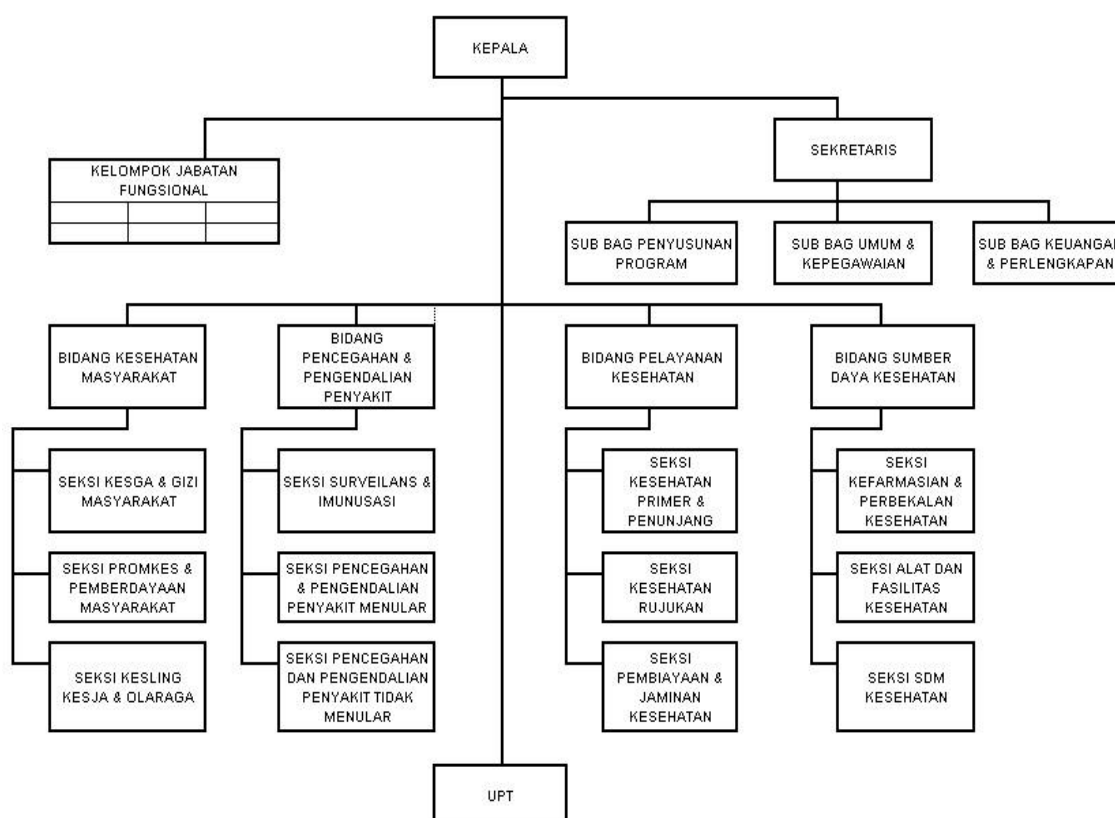
- 1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan mutu alat dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pengawasan alat kesehatan rumah tangga, penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal dan penerbitan izin produksi alat kesehatan kelas 1;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan mutu alat dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pengawasan alat kesehatan rumah tangga, penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal dan penerbitan izin produksi alat kesehatan kelas 1;

- c) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan mutu alat dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pengawasan alat kesehatan rumah tangga, penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal dan penerbitan izin produksi alat kesehatan kelas 1;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- u. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
 2. Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan termasuk penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan termasuk penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;
 - c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan termasuk penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;

- d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan termasuk penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- v. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, pada gambar 2.1

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk program dan kegiatan kesehatan berpengaruh besar dari ketersediaan fasilitas dan sumberdaya kesehatan, meliputi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), baik sarana dan peralatan kesehatan serta sarana penunjang dan pembiayaan kesehatan.

1. Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kualifikasi

Tenaga Kesehatan Kabupaten Bengkalis pada bulan Desember 2015 berjumlah 1.304 orang pada Dinas Kesehatan, RSUD dan UPT Puskesmas dan jaringannya dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kualifikasi

No	Kualifikasi Tenaga	L	P	Jumlah
1	Dokter Spesialis	63	43	106
2	Dokter Umum	34	107	141
3	Dokter Gigi	7	33	40
4	Bidan	0	497	497
5	Perawat	143	471	614
6	Perawat Gigi	0	13	13
7	Tenaga Kefarmasian	11	74	85
8	Apoteker	3	28	31
9	Kesehatan Masyarakat	12	21	33
10	Kesehatan Lingkungan	4	12	16
11	Nutrisionis	2	43	20
12	Fisioterapi	4	10	14
13	Terapi Okupasi	1	0	1
14	Radiografer	5	6	11
15	Analisis Kesehatan	7	61	68
16	Refraksi Optisi	1	2	3
17	Rekam Medik	3	9	12
18	Teknis Program	5	12	17
19	Staf Administrasi	59	117	176
20	Staf Penunjang Teknologi	1	2	3
21	Staf Juru	16	0	16
	Jumlah	381	1561	1917

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bengkalis Tahun 2018

2. Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jabatan Eselon

Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi dengan pegawai menduduki jabatan eselon sebagai berikut ;

Tabel 2.2

ASN Yang Menduduki Jabatan Eselon

No	Jabatan	Jumlah	Satuan
a.	Eselon IIb	1	Orang
b.	Eselon IIIa	1	Orang
c.	Eselon IIIb	4	Orang
d.	Eselon IVb	33	Orang
e.	Eselon IVa	18	Orang
	Jumlah	57	Orang

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Tahun 2018

3. Tenaga Kesehatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah tenaga kesehatan dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pangkat dan golongan pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Tenaga Kesehatan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Personil
1.	IV/c	1
2.	IV/b	9
3.	IV/a	23
4.	III/d	80
5.	III/c	96
6.	III/b	139
7.	III/a	113
8.	II/d	56
9.	II/c	143
10.	II/b	16
11.	II/a	9
	Jumlah	681

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Tahun 2018

4. Sarana dan Fasilitas Kesehatan
 - a. Jumlah sarana pelayanan kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Satuan
1	Rumah Sakit Pemerintah	2	Unit
2	Rumah Sakit Swasta	6	Unit
3	Puskesmas	18	Unit
4	Puskesmas Pembantu	45	Unit
5	Puskesmas Keliling	1	Unit
6	Mobil Ambulans	111	Unit
7	Puskesmas Keliling Air	0	Unit
8	Poskesdes	64	Unit
9	Polindes	20	Unit
10	Posyandu	504	Unit
11	Poslansia	130	Unit
12	Posbindu PTM	155	Unit

Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kesehatan

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di bidang Kesehatan . Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD.

Capaian pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut ;

1. Angka usia harapan hidup

Angka usia harapan hidup target 72 tahun dengan realisasi 72 tahun capaian 100%. Untuk angka usia harapan hidup Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mengikuti dan menggunakan hasil dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012 dengan angka usia harapan hidup 72 tahun.

2. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi (AKB) usia 0 – 11 bulan merupakan jumlah kasus kematian yang dilaporkan fasilitas kesehatan dengan target tahun 2015 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan realisasi sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian 21%. Angka kasus kematian bayi dicatat dan dilaporkan relatif lebih rendah dari target yang ditetapkan, sedangkan target MDGs 2015 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup.

3. Persentase balita gizi buruk

Jumlah kasus balitas gizi buruk sebesar 4 kasus dengan target 15% realisasi 0.01 % dengan capaian sebesar 0.07%. Balita gizi buruk sejumlah 4 kasus relatif lebih kecil dari total 42.011 balita ditimbang pada tahun 2015.

4. Rasio posyandu terhadap jumlah balita

Target capaian jumlah total posyandu 401 pos dengan capaian sebesar 459 posyandu atau 114%. Jumlah 459 posyandu dengan rasio 1 posyandu melayani 100 balita didapatkan angka 1 per 100 balita dengan jumlah 61.958 balita.

5. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk

Rasio jumlah rumah sakit 1 per 100.000 dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 571.331 jiwa (proyeksi) sedangkan jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta saat ini berjumlah 6 unit, RS pemerintah 2 unit sedangkan RS swasta 4 unit, sehingga rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk sudah mencukupi, namun sebaran lokasi rumah sakit perlu dipertimbangan dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Bengkalis yang terpisah daratan dan kepulauan untuk akses peningkatan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat.

6. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk

Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk dengan target 1 per 100.000 penduduk sedangkan realisasi sebesar 3 per 100.000 penduduk dengan capaian sebesar 300%. Realisasi lebih dari 100% dengan jumlah Puskesmas 18 unit terhadap jumlah penduduk 571.331 jiwa diperoleh rata-rata 1 unit Puskesmas melayani 30.000 penduduk, namun dengan

kondisi geografis terdiri daratan dan kepulauan perlu memprioritaskan untuk sebaran sarana Puskesmas di wilayah Kecamatan yang strategis untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

7. Rasio Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk

Rasio Puskesmas Pembantu target 7 per 100.000 penduduk realisasi 3 per 100.000 dengan capaian < 100%. Jumlah Puskesmas Pembantu 62 unit dibandingkan dengan jumlah penduduk 571.331 jiwa rata-rata 1 unit Puskesmas Pembantu melayani 10.000 penduduk. Jika diharapkan Puskesmas Pembantu dapat melayani 1.000 – 3.000 penduduk tentunya masih diperlukan peningkatan jumlah sarana. Meskipun belum sesuai dengan diharapkan Dinas Kesehatan mengupayakan penyebaran sarana kesehatan di desa dengan menyiapkan Poskesdes dan Polindes untuk tujuan terpenuhinya akses pelayanan kesehatan.

8. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk

Rasio dokter umum target 21 per 100.000 realisasi 20 per 100.000 dengan capaian 95%. Jumlah dokter umum tahun 2015 sebesar 101 orang dengan jumlah penduduk 573.683 jiwa dengan rata-rata dokter 1 orang melayani 5.000 orang.

9. Rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk ditargetkan sebesar 6 per 100.000, sedangkan realisasi sebesar 7 per 100.000 dengan capaian sebesar > 100%. Jumlah dokter spesialis tahun 2015 berjumlah 35 orang yang tersebar di RS Bengkalis, Mandau dan Swasta lainnya. Jika dilihat rasio dokter spesialis tersebut untuk melayani jumlah 573.683 penduduk sudah mencukupi, namun masih terdapat kekurangan dari segi jenis spesialisasi yang dimiliki oleh rumah sakit yang ada seperti spesialis gizi, anesthesia, radiologi, paru, jantung. Jumlah spesialis ini masih terkendala untuk dipenuhi dikarenakan keterbatasan jumlah secara nasional, sehingga solusi yang dilakukan yaitu rumah sakit melakukan perjanjian kerja untuk penugasan dokter spesialis (resident) dengan beberapa institusi rumah sakit pendidikan.

10. Rasio dokter gigi terhadap jumlah penduduk

Rasio dokter gigi dengan target 9 per 100.000 penduduk dengan realisasi 9 per 100.000 dengan capaian sebesar 100%. Dengan jumlah 44 orang dokter gigi yang tersebar difasilitas kesehatan yang ada baik pemerintah maupun swasta dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan pelayanan dokter gigi bagi masyarakat. Hampir semua Puskesmas (16 Puskesmas) di Kabupaten Bengkalis telah memiliki dokter gigi sehingga yang perlu menjadi pertimbangan untuk pemerataan pelayanan adalah penugasan dokter gigi dengan pertimbangan sebaran wilayah sehingga tidak terjadi penumpukan dokter gigi pada satu unit pelayanan saja.

11. Rasio bidan terhadap jumlah penduduk

Rasio bidan per 100.000 penduduk dengan target 26 realisasi 51 dengan capaian >100%. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah bidan yang bekerja difasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat dengan jumlah 256 orang bidan. Capaian ini memberikan gambaran telah terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan kesehatan tenaga bidan, namun yang masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan dan sebaran tenaga bidan yang ditempatkan didesa-desa.

12. Rasio perawat terhadap jumlah penduduk

Target rasio perawat per 100.000 penduduk yaitu 110 per 100.000 dengan realisasi 78 per 100.000 dengan capaian 71%. Hal ini jumlah 357 orang dengan jumlah penduduk belum terpenuhinya kebutuhan tenaga perawat dengan jumlah penduduk 573.683 jiwa, namun Dinas Kesehatan memperhatikan sebarannya disarana kesehatan untuk memenuhi pemerataan disetiap Puskesmas, sehingga keterbatasan jumlah tenaga perawat tidak berpengaruh sangat besar terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

13. Rasio apoteker terhadap jumlah penduduk

Target rasio apoteker per 100.000 penduduk yaitu 17 per 100.000 dengan realisasi 2 per 100.000 dengan capai 9%. Keterbatasan jumlah tenaga Apoteker 9 orang belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian Dinas Kesehatan.

Memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penerimaan pegawai tenaga kesehatan melalui mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan formasi terbatas bagi apoteker serta jumlah ketersediaan lulusan apoteker juga masih terbatas Dinas Kesehatan telah mengupayakan usulan tambahan formasi untuk tenaga apoteker bagi sarana kesehatan.

14. Rasio tenaga gizi terhadap jumlah penduduk

Target rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk yaitu 25 per 100.000 dengan realisasi 3 per 100.000 dengan capaian 14%. Tenaga gizi saat ini berjumlah 16 orang belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk bagi tenaga gizi. Dinas Kesehatan lebih memperhatikan keterbatasan ini dengan melakukan sebaran tenaga gizi menyesuaikan dengan jumlah Puskesmas yang dimiliki sehingga dapat mendukung kelangsungan program gizi bagi masyarakat.

15. Rasio tenaga kesehatan masyarakat terhadap jumlah penduduk

Target tenaga kesmas per 100.000 penduduk yaitu 8 per 100.000 dengan realisasi 6 per 100.000 dengan capaian sebesar 72%. Tenaga kesehatan masyarakat belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk bagi tenaga kesehatan masyarakat dengan jumlah 33 orang yang tersebar di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Dalam hal Dinas Kesehatan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penerimaan pegawai tenaga kesehatan melalui mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan formasi terbatas sehingga Dinas Kesehatan akan menghitung kembali kebutuhan tenaga kesematan masyarakat yang akan disusun dalam formasi kebutuhan tenaga bagi Dinas Kesehatan.

16. Rasio tenaga sanitarian terhadap jumlah penduduk

Target rasio tenaga sanitarian per 100.000 penduduk yaitu 26 per 100.000 dengan realisasi 2 per 100.000 dengan capai sebesar 9%. Untuk tenaga sanitarian selain masih tersedia jumlah sedikit di sarana kesehatan dengan jumlah 14 orang sanitarian. Dinas Kesehatan tetap memperhatikan sebaran dari tenaga sanitarian (kesehatan lingkungan) terutama untuk Puskesmas strategis dan daerah dengan kebutuhan program secara khusus.

17. Komplikasi kebidanan ditangani

Komplikasi kebidanan yang ditangani dengan target 100% sedangkan realisasi 66 dengan capaian sebesar 66%. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sejumlah 1.679 kasus (66%) dari jumlah sasaran 2.537 ibu hamil risiko tinggi. Hal ini merupakan kasus komplikasi yang dilayani dan dilaporkan oleh fasilitas kesehatan serta cakupan masih belum sesuai target untuk komplikasi kebidanan yang ditangani disebabkan Puskesmas juga merujuk kasus komplikasi kebidanan ke rumah sakit yang memerlukan tindakan obstetri ginekologi komprehensif, sehingga yang dilaporkan merupakan kasus komplikasi yang ditangani dengan kasus emergensi dasar.

18. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan target sebesar 95% dari sasaran 12.108 dengan realisasi sebesar 10.911 persalinan atau 90% dengan capaian sebesar 95%. Belum tercapainya target ini perlu dilakukan peningkatan promosi kesehatan bagi ibu hamil untuk peningkatan kualitas sesuai standar pelayanan antenatal care dan pendekatan kemitraan bidan dan dukun bersalin untuk meningkatkan perlu persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan.

19. Desa/kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI)

Untuk target UCI sejumlah 155 desa/kelurahan 100% sedangkan realisasi 60% atau 93 Desa/Kelurahan. Cakupan ini belum sesuai dengan target diharapkan dikarenakan adanya perubahan jenis antigen yang menjadi indikator HB0 (Hepatitis B) pada bayi baru lahir 0-24 jam sehingga pelayanan bayi baru lahir yang belum adekuat membuat cakupan imunisasi ini sangat rendah. Hal ini akan menjadi perhatian Dinas Kesehatan untuk peningkatan pelayanan bayi baru lahir sehingga semua bayi baru lahir usia 0-7 hari memperoleh pelayanan yang optimal, sedangkan jumlah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan minimal 4 kali sebesar 93% dari target 100%.

20. Balita gizi buruk mendapat perawatan

Target kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100% dengan realisasi 100% dengan capaian sebesar 100%. Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan sebanyak 4 kasus dan telah mendapatkan perawatan melalui penatalaksanaan kasus balita gizi buruk meliputi rehabilitasi awal, lanjutan dan tindak lanjut, sedangkan persentase kasus gizi buruk yang temukan sebesar 0.01% dari total 42.101 balita yang ditimbang.

21. Penemuan dan penanganan penderita TB BTA Positif

Target penemuan dan penanganan penderita TB Paru BTA Positif sebesar 100% dengan realisasi 45% dan capaian sebesar 45%. Dari total sasaran sebanyak 643 kasus yang ditemukan dan mendapat pengobatan sebesar 292 penderita dan sembuh mendapatkan pengobatan sebesar 85% atau 248 penderita BTA Positif dan pengobatan lengkap. Belum tercapainya penemuan dan penanganan penderita baru TB Paru BTA Positif dalam penemuan penderita masih bersifat pasif dan longgar yaitu melakukan deteksi dan seleksi terhadap penderita batuk lebih dari 7 hari yang berkunjung ke fasilitas kesehatan.

22. Penemuan dan penanganan penderita demam berdarah dengue (DBD)

Target penemuan dan penanganan penderita DBD yaitu 100% dengan realisasi dan capaian >100%. Hal ini terjadi dikarenakan kenaikan jumlah kasus DBD dari sasaran yang ditetapkan sejumlah 316 kasus DBD sedangkan kasus DBD yang terjadi tahun 2015 sebesar 678 kasus. Terjadi lonjakan kasus yang sangat besar namun semua kasus telah ditangani dengan melakukan penyemprotan nyamuk (fogging) dan pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk, sedangkan kasus kematian yang disebabkan DBD sebanyak 7 kasus. Hal ini akan menjadi perhatian Dinas Kesehatan pada tahun 2016 untuk meningkatkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan pembasmian jentik nyamuk DBD di RW seluruh desa dan kelurahan.

23. Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Target pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin pada strata I (Rumah Sakit Kabupaten) sebesar 100% dengan realisasi sebesar

56% dan dengan capaian sebesar 56%. Memperhatikan jumlah masyarakat miskin sasaran 243 orang hanya 137 orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Kabupaten (Strata 1) yang membutuhkan pelayanan lebih kompleks, sedangkan untuk kasus tertentu masih dapat dilakukan perawatan di Puskesmas Rawat Inap.

24. Pelayanan Kesehatan bayi

Target kunjungan bayi sebesar 100% dengan realisasi 93% sedangkan capaian sebesar 93%. Pelayanan kunjungan bayi merupakan bayi yang minimal mendapatkan pelayanan kesehatan 4 kali usia bayi 0 – 11 bulan disarana kesehatan dari total jumlah bayi 11.531 bayi yang mendapatkan pelayanan sebesar 10.781 bayi di Puskesmas, Puskemas pembantu, Poskesdes, Polindes. Belum tercapainya target ini dikarenakan belum optimalnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi 0-11 bulan minimal 4 kali yaitu usia 1-3 bulan 1 kali, usia 3-6 bulan 1 kali, usia 6-9 bulan 1 kali dan usia 9-11 bulan 1 kali.

25. Pelayanan kunjungan puskesmas

Target kunjungan Puskesmas sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian 100%. Seluruh kunjungan Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan baik kunjungan sehat seperti imunisasi, gizi, kia, kb dan kunjungan sakit rawat jalan dan rawat inap. Total kunjungan Puskesmas sebesar 367.664 kunjungan dengan kunjungan kasus rawat jalan sebesar 631.958 kunjungan sedangkan kunjungan rawat inap sejumlah 1.951 kunjungan.

26. Pelayanan kunjungan puskesmas pembantu

Cakupan kunjungan Puskesmas Pembantu target 100% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100% dengan total jumlah kunjungan sebesar 30.639 kunjungan dengan kunjungan kasus rawat jalan sebesar 30.133 kunjungan.

Hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi ukuran capaian pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut ;

1. Program Pelayanan Kesehatan Dasar

- a) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil yang memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali (K-4) selama kehamilan adalah sebesar 11.741 (93%) dari jumlah sasaran 12.684 ibu hamil dengan target 95%.
- b) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sejumlah 1.679 kasus (66%) dari jumlah sasaran 2.537 ibu hamil risiko tinggi dengan target 80%
- c) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 10.911 persalinan (90%) dari jumlah sasaran 12.108 ibu bersalin dengan target 90%
- d) Cakupan Pelayanan Nifas sebesar 10.952 ibu nifas (95%) dari jumlah sasaran 11.531 ibu nifas dengan target 90%
- e) Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani tenaga kesehatan, kasus neonatus komplikasi ditemukan sejumlah 179 kasus (9%) dari jumlah sasaran 1.903 neonatus dengan komplikasi dengan target 80%.
- f) Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 10.781 kunjungan bayi (93%) dari jumlah sasaran 11.531 bayi dengan target 95%
- g) Cakupan Desa/Kelurahan UCI pada adalah sebesar 143 desa/kelurahan (92%) dari 155 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
- h) Cakupan Pelayanan Anak Balita sebesar 42.011 balita (68%) dari 61.958 balita dengan target 90%
- i) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin sebesar 419 (13%) dari 3.263 balita dengan target 100%
- j) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 4 kasus gizi buruk (100%) dari 4 kasus Gizi Buruk yang ditemukan.
- k) Cakupan Penjangkaran Kesehatan siswa SD Kelas I dan setingkat adalah 9.749 anak (96%) dari 10.151 siswa dengan target 100%
- l) Cakupan peserta KB aktif sebesar 38.394 PUS (40%) dari 95.213 PUS dengan target 70%
- m) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit:

- 1) *Accute Flaccid Paralysis (AFP)* sebesar ≤ 1 per 100.000 dari 189.315 anak dibawah 15 tahun dengan target ≤ 2 per 100.000.
 - 2) Penemuan Penderita Pneumonia Balita sebesar 1.102 penderita (15%) dari 7.406 sasaran dengan target 100%
 - 3) Penemuan Pasien Baru TB BTA (+) sebesar 292 penderita (45%) dari total jumlah sasaran 643 penderita dengan target 100%
 - 4) Penderita DBD yang ditangani sebesar 678 penderita (215%) dari jumlah sasaran sebesar 316 kasus. Pada tahun 2015 terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi.
 - 5) Penemuan Penderita dan Penatalaksanaan Diare sebesar 11.625 penderita (71%) dari jumlah sasaran 16.350 penderita.
- n) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat miskin sebesar 9.328 (57%) dari sasaran 16.233 masyarakat miskin tidak mampu dengan target 100%.
2. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - a) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan adalah sebesar 137 pasien (56%) dari jumlah 243 sasaran rujukan dengan target 100%
 - b) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus capaian sejumlah 6 unit (100) dari 6 RS di Kabupaten dengan target 100%
 3. Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB.

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam sebanyak 2 Desa dari 2 kasus KLB (100%)
 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Siaga Aktif pada tahun 2015 adalah sebesar 71 desa/ kelurahan (46%) dari 155 desa/kelurahan dengan target 80%

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Terhadap Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kelangsungan hidup bayi	968	970	972	974	976	996	992	993	995	995	103	102	102	102	102
2	Angka kematian bayi	32	30	28	26	24	4	8	7	5	5	13	27	24	18	21
3	Angka usia harapan hidup	69	69.5	70	71	72	69	70	70	71	72	100	100	100	100	100
4	Persentase balita gizi buruk	19	18	17	16	15	2	1	8	2	2	11	6	47	13	13
5	Rasio posyandu per satuan balita	306	326	345	364	383	424	430	431	436	480	138	132	125	120	125
6	Rasio puskesmas per satuan penduduk	3	4	1	1	1	11	11	14	14	16	367	275	1400	1400	1600
7	Rasio pustu per satuan penduduk	3	4	5	6	7	53	53	55	56	58	1767	1325	1100	933	829
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	200	200	200	200	200
9	Rasio dokter per satuan penduduk															
10	Dokter umum	52	58	60	64	70	74	90	77	79	82	142	155	128	123	117
11	Dokter spesialis	18	22	28	30	34	34	42	32	35	35	189	191	114	117	103
12	Dokter gigi	20	24	28	30	35	22	29	28	28	44	110	121	100	93	126
13	Rasio tenaga medis per satuan penduduk															
14	Bidan	24	25	25	26	26	260	246	234	274	294	1083	984	936	1054	1131
15	Perawat	292	324	344	372	385	417	394	344	434	445	143	122	100	117	116

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
16	Apoteker	3	4	5	6	7	7	9	9	8	9	233	225	180	133	129
17	Ahli gizi	11	12	13	14	15	19	22	18	19	20	173	183	138	136	133
18	Kesmas	28	32	36	38	33	48	44	28	30	33	171	138	78	79	100
19	Sanitarian	11	14	16	18	20	19	14	16	13	14	173	100	100	72	70
20	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	62	67	71	75	79	48	100	54	81	66	78	149	77	108	84
21	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85	87	89	91	95	87	89	86	89	90	103	103	97	98	95
22	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85	90	95	100	100	91	94	100	100	60	107	105	105	100	60
23	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita baru penyakit TB Paru BTA Positif	75	80	85	90	93	53	32	24	67	55	70	41	28	75	59
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	49	9	1	28	56	49	9	1	28	56
27	Cakupan kunjungan bayi	96	97	98	99	100	62	91	68	94	93	65	94	70	95	93
28	Cakupan puskesmas	70	70	70	70	70	137	137	175	175	64	196	196	250	250	91
29	Cakupan pembantu puskesmas	70	70	70	70	70	52	52	54	55	64	74	74	77	79	91

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2011 - 2015

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	93	95	98	100	100	101	96	91	94	93	109	101	93	94	93
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	62	67	71	75	79	48	100	54	81	66	78	149	77	108	84
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	62	67	71	75	79	87	89	86	89	90	141	133	122	119	114
4	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	62	67	71	75	79	97	87	90	90	95	156	130	127	120	120
5	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	65	70	75	80	85	5	100	3	18	9	7	143	4	22	11
6	Cakupan Kunjungan Bayi	96	97	98	99	100	62	91	68	94	93	65	94	70	95	93
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85	90	95	100	100	91	94	100	100	60	107	105	105	100	60
8	Cakupan Pelayanan Pemantauan Tumbuh-Kembang Anak Balita	80	82	84	85	87	13	51	37	52	68	16	62	44	61	78
9	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	100	100	100	100	100	12	0	67	0	13	12	0	67	0	13
10	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa Kelas I SD dan Setingkat oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih	80	85	90	95	100	7	85	3	93	96	8	100	4	98	96
12	Cakupan Peserta KB Aktif	50	55	60	65	70	0	62	63	54	40	0	112	106	83	57
13	Angka Penemuan Acute Flacid Paralysis	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	50	100	50	100	100
14	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	70	80	90	100	100	25	18	18	77	15	35	23	20	77	15

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
15	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	75	80	85	90	93	53	32	24	67	55	70	41	28	75	59
16	Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100	100	94	103	99	65	71	94	103	99	65	71
18	Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	100	100	100	100	100	45	68	89	41	57	45	68	89	41	57
19	Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100	100	49	9	1	28	56	49	9	1	28	56
20	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan oleh Sarana Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Cakupan Desa Siaga Aktif	20	25	30	35	40	70	70	97	97	41	348	278	324	278	103

Sumber : Pencapaian Indikator SPM Tahun 2011 - 2015

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan

Program	Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.308	2.121	2.207	2.554	3.334	3.327	1.834	1.867	1.461	1.719	2.313	2.701	79,46	88,02	66,20	67,31	69,38	81,18	16,67	16,67
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	9.192	2.709	3.152	992	1.980	1.485	7.840	2.298	1.704	551	1.371	1.318	85,29	84,83	54,06	55,54	69,24	88,75	16,67	16,67
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	142	-	-	-	-	-	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	16,67	16,67
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	159	30	698	445	1.277	470	153	28	443	260	1.047	448	96,23	93,33	63,47	58,43	81,99	95,32	16,67	16,67
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	-	-	150	-	301	425	-	-	71	-	119	183	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	43,06	16,67	16,67
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	895	978	1.436	1.832	2.415	2.876	821	926	1.328	1.492	1.851	2.605	91,73	94,68	92,48	81,44	76,65	90,58	16,67	16,67
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.667	39.090	46.126	54.534	56.618	66.401	6.787	25.925	43.931	42.795	52.717	58.991	88,52	66,32	95,24	78,47	93,11	88,84	16,67	16,67
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	862	314	331	480	-	-	555	287	319	440	0,00	0,00	0,00	91,40	96,37	91,67	16,67	16,67
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	969	1.260	2.157	1.600	1.691	1.256	928	1.178	1.882	1.475	785	1.094	95,77	93,49	87,25	92,19	46,42	87,10	16,67	16,67
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	138	492	8.333	314	879	1.010	116	387	550	290	661	671	84,06	78,66	6,60	92,36	75,20	66,44	16,67	16,67
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	550	832	2.262	1.578	3.295	3.742	411	633	1.789	1.308	2.817	2.939	74,73	76,08	79,09	82,89	85,49	78,54	16,67	16,67
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	94	138	618	320	873	1.222	93	138	485	256	497	808	98,94	100	78,48	80,00	56,93	66,12	16,67	16,67
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	3.219	5.404	16.797	11.381	25.093	10.738	2.923	4.668	15.837	8.585	22.726	10.062	90,80	86,38	94,28	75,43	90,57	93,70	16,67	16,67
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	-	-	-	-	475	934	-	-	-	-	-	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	16,67	16,67

Program	Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	-	-	458	366	-	-	-	-	338	296	-	-	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	16,67	16,67
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	-	129	189	-	-	349	-	129	132	-	-	288	0,00	100	69,84	0,00	0,00	82,52	16,67	16,67
Program Peningkatan Pelayanan Lansia	-	-	-	-	230	173	-	-	-	-	88	139	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	80,35	16,67	16,67
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	181	217	644	595	772	911	170	179	384	475	592	716	93,92	82,49	59,63	79,83	76,68	78,59	16,67	16,67
Total Anggaran	25.372	53.400	86.089	76.825	99.564	95.941	22.076	38.356	70.890	59.789	87.903	84.170	87,01	71,83	82,35	77,82	88,29	87,73	16,67	16,67

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 - 2015

Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 171 pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta. Alokasi APBN 5% dan APBD 10% diprioritaskan untuk pelayanan publik yang sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan APBN dan APBD. Pada Pasal 172 ayat 3 dijelaskan alokasi pembiayaan kesehatan pada Pasal 171 untuk pelayanan publik terutama bagi penduduk miskin, kelompok lansia, dan anak terlantar. Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis, sebetulnya masih kurang dari target anggaran APBN dan APBD. Pencapaian prosentase penentuan pembiayaan sesuai Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan belum mencapai 10%.

Anggaran kesehatan yang terealisasi saat ini cukup memadai untuk kebutuhan peningkatan kesehatan di Kabupaten Bengkalis yang masih memerlukan upaya kuratif yang lebih tinggi, sehubungan dengan jumlah masyarakat miskin yang semakin bertambah dan meningkatnya penyakit degeneratif atau penyakit tak menular dengan bertambahnya usia harapan hidup. Namun sesuai dengan peningkatan kesehatan masyarakat dan meningkatnya usia harapan hidup manusia di Kabupaten Bengkalis, diharapkan kendali pembiayaan diikuti kepada berkurangnya realisasi anggaran untuk kuratif dan rehabilitatif dan diikuti realisasi pembiayaan promotif dan preventif yang seimbang.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Kesehatan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kesehatan menuntut peningkatan peran dan kapasitas Dinas Kesehatan dan jajarannya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin lebih baik lagi.

Secara garis besar lingkungan strategis bersifat eksternal yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terdiri atas 2 (dua) isu yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan terkait globalisasi adanya perubahan iklim, demografi, dan

Sustainable Development Goals dimana isu-isu tersebut saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun Tantangan dan Peluang yang mempengaruhi peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Peningkatan Jumlah Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis menurut sensus penduduk tahun 2010 dalam lima tahun terakhir sampai tahun 2015 sebesar hampir 45 ribu jiwa (naik sebesar 1.67 % pertahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 akan mencapai 600 ribu – 700 ribu jiwa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin		
		L	P	JLH
1	Mandau	81,295	76,153	157,448
2	Pinggir	33,423	31,697	65,120
3	Bukit Batu	9,336	9,211	18,547
4	Siak Kecil	10,908	10,261	21,169
5	Rupat	17,789	16,845	34,634
6	Rupat Utara	7,673	7,247	14,920
7	Bengkalis	41,858	40,618	82,476
8	Bantan	20,740	20,172	40,912
9	Bandar Laksamana	8,233	7,713	15,946
10	Talang Muandau	13,541	12,686	26,227
11	Bathin Solapan	48,708	45,632	94,340
	Total	293,504	278,235	571,739

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2018 (Proyeksi)

Tabel 2.7
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2010 – 2015
Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin																	
		2010			2011			2012			2013			2014			2015		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Mandau	113.848	105.416	219.264	118.001	109.271	227.272	121.174	112.220	233.394	124.531	114.830	239.361	121.974	114.058	236.032	123.665	115.848	239.513
2	Pinggir	40.517	37.887	78.404	43.283	40.478	83.761	45.657	42.701	88.358	48.199	44.885	93.084	43.767	41.338	85.105	44.490	42.045	86.535
3	Bukit Batu	15.424	14.704	30.128	16.000	15.256	31.256	16.444	15.679	32.123	16.913	16.057	32.970	16.491	15.885	32.376	16.727	16.113	32.840
4	Siak Kecil	9.691	9.018	18.709	9.924	9.234	19.158	10.081	9.382	19.463	10.249	9.498	19.747	10.287	9.678	19.965	10.419	9.801	20.220
5	Rupat	15.747	14.803	30.550	16.037	15.077	31.114	16.213	15.243	31.456	16.403	15.356	31.759	16.738	15.900	32.638	16.982	16.081	33.063
6	Rupat Utara	6.741	6.279	13.020	6.954	6.478	13.432	7.111	6.626	13.737	7.278	6.752	14.030	7.220	6.779	13.999	7.303	6.898	14.201
7	Bengkalis	36.849	35.372	72.221	37.724	36.216	73.940	38.315	36.786	75.101	38.947	37.233	76.180	39.371	38.117	77.488	39.876	38.695	78.571
8	Bantan	18.382	17.657	36.039	18.573	17.824	36.397	18.645	17.914	36.559	18.733	17.922	36.655	19.542	18.993	38.535	19.793	19.251	39.044
	Total	257.199	241.136	498.335	266.496	249.834	516.330	273.640	256.551	530.191	281.253	262.533	543.786	275.390	260.748	536.138	279.255	264.732	543.987

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka Tahun 2010 -2015

Tabel 2.8
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2016 – 2021
Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin																	
		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Mandau	125,743	117,794	243,537	127,855	119,773	247,628	81,295	76,153	157,448	82,596	77,371	159,967	83,917	78,609	162,527	85,260	79,867	165,127
2	Pinggir	45,300	42,810	88,110	46,124	43,589	89,713	33,423	31,697	65,120	33,958	32,204	66,162	34,501	32,719	67,221	35,053	33,243	68,296
3	Bukit Batu	17,003	16,379	33,382	17,284	16,649	33,933	9,336	9,211	18,547	9,485	9,358	18,844	9,637	9,508	19,145	9,791	9,660	19,452
4	Siak Kecil	10,579	9,952	20,531	10,742	10,105	20,847	10,908	10,261	21,169	11,083	10,425	21,508	11,260	10,592	21,852	11,440	10,761	22,201
5	Rupat	17,247	16,332	33,579	17,516	16,587	34,103	17,789	16,845	34,634	18,074	17,115	35,188	18,363	17,388	35,751	18,657	17,667	36,323
6	Rupat Utara	7,424	7,013	14,437	7,547	7,129	14,676	7,673	7,247	14,920	7,796	7,363	15,159	7,921	7,481	15,401	8,047	7,600	15,648
7	Bengkalis	40,526	39,326	79,852	41,187	39,967	81,154	41,858	40,618	82,476	42,528	41,268	83,796	43,208	41,928	85,136	43,900	42,599	86,499
8	Bantan	20,104	19,553	39,657	20,419	19,860	40,279	20,740	20,172	40,912	21,072	20,495	41,567	21,409	20,823	42,232	21,752	21,156	42,907
9	Bandar Laksamana	-	-	-	-	-	-	8,233	7,713	15,946	8,365	7,836	16,201	8,499	7,962	16,460	8,635	8,089	16,724
10	Talang Muandau	-	-	-	-	-	-	13,541	12,686	26,227	13,758	12,889	26,647	13,978	13,095	27,073	14,201	13,305	27,506
11	Bathin Solapan	-	-	-	-	-	-	48,708	45,632	94,340	49,487	46,362	95,849	50,279	47,104	97,383	51,084	47,858	98,941
	Total	283,926	269,159	553,085	288,674	273,659	562,333	293,504	278,235	571,739	298,200	282,687	580,887	302,971	287,210	590,181	307,819	291,805	599,624

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis 2016 (Laju Pertambahan Penduduk Rerata 1,67% per Tahun)

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya intensitas curah hujan dan suhu udara dapat meningkatkan jumlah kasus penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Menurut kementerian kesehatan bekerja sama dengan Research Center For Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013 melaksanakan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim. Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya demam berdarah dengue dan malaria. Bukti ilmiah yang diperoleh hingga saat ini menyatakan bahwa pertumbuhan penyakit yang disebabkan oleh variabilitas dan perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap epidemiologi penyakit yang ditularkan baik oleh vector (vector-borne disease), air (water-borne disease), dan udara (air-borne disease). Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sesak nafas (Asma) penyakit kulit lainnya.

Ditambah pula dengan kecenderungan semakin meningkatnya penyakit degenerative atau penyakit tidak menular seperti asma, tekanan darah tinggi dan diabetes melitus menjadi beban ganda bagi Dinas Kesehatan dalam mensukseskan pembangunan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya tantangan ini diperlukan peranan dari Dinas Kesehatan dalam untuk menyiapkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi.

Tabel 2.9
Penyakit 10 Terbesar Untuk Semua Golongan Umur
Di Puskesmas Tahun 2015

NO	NAMA PENYAKIT	KASUS BARU	
		JUMLAH	%
1	ISPA (Pneumonie)	70.456	45,86
2	Tekanan Darah Tinggi (High Blood Pressure)	20.297	13,21
3	Reumatik (Rheumatic)	11.130	7,24
4	Dispepsia (Dyspepsia)	9.427	6,14
5	Gastritis dan Duodenitis (Gastrointestine Disease)	8.950	5,83
6	Influenza	8.599	5,60
7	Penyakit Kulit Infeksi (Skin Infection)	8.219	5,35
8	Diare (Diarrhea)	8.168	5,32
9	Asma (Asthma)	4.845	3,15
10	Penyakit Kulit dan Jaringan Sub Kutan (Skin and Sub Skin Disease)	3.547	2,31
	JUMLAH	153.638	100

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

3. Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Indikator Indonesia Sehat 2010 dan jumlah penduduk maka jumlah puskesmas di Kabupaten Bengkalis saat ini 16 Puskesmas operasional yang seharusnya 24 Puskesmas dengan pertimbangan letak geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari daratan dan pulau. Peningkatan jumlah Puskesmas menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Gizi, Farmasi, Kesehatan Masyarakat masih kurang dibandingkan 16 buah jumlah Puskesmas yang ada. Begitu pula dengan banyaknya program di Puskesmas tenaga kesehatan Perawat dan Bidan sering mengelola program rangkap di

Puskesmas yang berdampak pada beratnya pencapaian kinerja program serta kurang efisien dan efektifnya pengelolaan, pencatatan dan pelaporan program di Puskesmas. Peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Puskesmas meliputi peralatan kesehatan, kendaraan operasional dan sarana kerja serta pendukung lainnya masih mempunyai masalah dalam hal penempatan, pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemusnahan sesuai prosedur, maupun perencanaan, pengembangan dan penelitian.

4. Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Banyaknya program dan kurangnya tenaga kesehatan yang menyebabkan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis kurang tercapai menjadi tantangan untuk melakukan restrukturisasi organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Hal ini dilakukan bertujuan menyelaraskan tugas dan fungsi bidang kesehatan sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan khususnya pada bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.4.2 Peluang

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Sistem ini merupakan Program negara (Pemerintah/masyarakat) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan resiko lainnya dan merupakan cara (means) sekaligus tujuan (ends) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam sistem jaminan sosial nasional juga diberlakukan penjaminan mutu pelayanan kesehatan dasar yang merupakan bagian dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khusus bagi masyarakat tidak mampu. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Dampak tersebut akan mengakibatkan peran FKTP dalam hal ini Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Bengkalis semakin meningkat melaksanakan pelayanan kesehatan primer.

2. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN)

Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. JKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan

lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan rumah sakit, puskesmas, dan kegiatan peran serta masyarakat.

Semakin banyak pelayanan kesehatan disediakan, maka akan mempengaruhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat antara lain tentunya kebutuhan peralatan dan obat akan semakin meningkat. Peningkatan mutu dan akses pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan kedepan bagi Dinas Kesehatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

3. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengaturan Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi bertujuan ; a). meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; b). meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan c). meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi dalam hal ini Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam memberikan pelayanan kesehatan primer menjadikan peran Dinas Kesehatan semakin besar untuk

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan semakin memiliki peluang terbuka untuk menyiapkan fasilitas kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan bagi masyarakat dengan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Bengkalis.

2.4.3 Pengembangan Pelayanan Kesehatan

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pengembangan pelayanan ditujukan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan pada seluruh aspek pelayanan. Rencana pengembangan pelayanan kesehatan sampai akhir tahun 2021 meliputi ; 1) Revitalisasi Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan primer yang telah disertifikasi terakreditasi; 2) Penambahan Puskesmas Rawat Inap dari 6 Puskesmas menjadi 8 Puskesmas dan penambahan 5 unit Puskesmas Non Rawat Inap menjadi 16 unit; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dengan membangun 2 unit Rumah Sakit Kelas C dan D Pratama; 4) Peningkatan pelayanan kesehatan dengan kompetensi khusus kawasan wisata di Kecamatan Rukat Utara; 5) Pengembangan Puskesmas mampu secara mandiri mengelola keuangan Puskesmas.

2.5 Analisis Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Komparasi atas sasaran Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, sasaran Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Riau 2014 – 2019 sebagai arah penetapan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.

2.5.1 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi

2.5.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Riau

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam rumusan misi yaitu ;

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, terjangkau dan merata.
2. Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat dari penyakit tidak menular serta tertanggulangnya wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa.
3. Meningkatnya ketersediaan obat & vaksin yang bermutu, terjangkau dan merata sesuai kebutuhan masyarakat serta pengawasan sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan yang beredar dimasyarakat
4. Meningkatnya kualitas hidup ibu melahirkan dan anak balita
5. Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya penanggulangan krisis kesehatan secara cepat dan tepat.

7. Meningkatnya perilaku dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.
8. Meningkatnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan system kesehatan ke wilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
9. Meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, terjangkau dan merata
10. Meningkatnya ketersediaan, mutu dan pemerataan distribusi sumberdaya kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai kebutuhan
11. Meningkatnya ketersediaan kebijakan publik berwawasan kesehatan.
12. Meningkatnya pelaksanaan system administrasi kesehatan yang berbasis teknologi informasi

2.5.3 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Selaras penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, berorientasi pada tujuan keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Provinsi Riau 2014-2019, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 memiliki sasaran strategis sebagai berikut ;

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya pemerataan pelayanan dan jaminan kesehatan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah
6. Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan.

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan telah dilakukan keselarasan dengan sasaran Renstra Kemenkes dan Diskes Provinsi Riau dimana sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis telah sinkron dan sinergis serta menjadi bagian dari sasaran Renstra OPD Diskes Propinsi Riau dan Renstra Kemenkes RI.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan yang direncanakan serta antara “apa” yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Identifikasi permasalahan kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 masih memiliki permasalahan kondisi kinerja diakhir tahun 2015 antara lain ;

- 1) Masih belum optimalnya kinerja kesehatan yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif pada penurunan angka kematian bayi termasuk pengelolaan tumbuh kembang bayi dan balita; penurunan angka kematian ibu; kesadaran hidup bersih dan sehat masyarakat; dan penanggulangan penyakit menular.

- 2) Belum terpenuhinya pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Apoteker, Ahli Gizi, Sanitarian, Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Bengkalis.
- 3) Puskesmas di Kabupaten Bengkalis belum terakreditasi dan belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- 4) Belum diselesaikannya rencana pendirian Rumah Sakit Pratama di Pulau Rupa untuk memperkecil ketimpangan akses pelayanan rujukan dan Revitalisasi Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Bengkalis.
- 5) Masih terdapatnya kesenjangan kesejahteraan dan proporsi atas jasa pelayanan antara tenaga dokter dengan tenaga medis lainnya.
- 6) Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan dari tenaga medis dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat sekalipun akreditasi rumah sakit sudah ber tipe B dan berbadan layanan umum daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kegiatan dan program kesehatan terdiri dari :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ; persalinan di fasilitas kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani, pelayanan kesehatan bayi, ibu hamil mendapat pelayanan kehamilan paling sedikit 4 kali sesuai standar, bayi baru lahir (neonatus) umur 0-28 hari komplikasi yang ditangani sesuai standar, pelayanan kesehatan balita (12-59 bulan), peserta kb aktif pada pasangan usia subur;
- 2) Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Peningkatan Penyakit Tidak Menular Menular Dan Penyehatan Lingkungan; penemuan dan penanganan penderita baru penyakit TB BTA(+); bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar; penderita pneumonia balita; penemuan penderita diare pada balita; sanitasi total berbasis masyarakat di kelurahan/desa; sarana air minum memenuhi syarat

kesehatan; sarana pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan; pelayanan kesehatan penderita tekanan darah tinggi; kelurahan/desa melaksanakan posbindu; deteksi dini kanker servik dan payudara dan kesehatan jiwa.

- 3) Pengendalian Sistem Kewaspaan Dini Gizi Dan Perbaikan Gizi Masyarakat ; Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan; Balita dengan gizi buruk; Ibu Hamil Kurang Energi Kronis mendapat Pemberian Makanan Tambahan; Balita gizi kurang mendapatkan makanan tambahan; ASI eksklusif pada bayi kurang 6 bulan;
- 4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Serta Pelayanan Jaminan Kesehatan ; pelayanan masyarakat miskin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar; pelayanan masyarakat miskin di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; pengembangan pelayanan jaminan pelayanan kesehatan; pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas; pelayanan kesehatan lansia;
- 5) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ; desa siaga aktif; pelayanan kesehatan siswa usia sekolah; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada rumah tangga; meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan; pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan;
- 6) Peningkatan, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan ; kecukupan dan distribusi tenaga kesehatan ; pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan; peningkatan pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu ; peningkatan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan; akreditasi puskesmas;
- 7) Peningkatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan ; ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas; pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakita sesuai standar; penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan; pembinaan peredaran obat dan vaksin di masyarakat;

- 8) Peningkatan program penunjang dan pengembangan kesehatan; pelayanan kesehatan kerja dasar; pelayanan kesehatan olah raga; pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan diperlukan adanya peningkatan kapasitas Puskesmas bagi masyarakat dapat melayani untuk 24 jam. Puskesmas yang direkomendasikan untuk ditingkatkan kapasitasnya baik dari segi peralatan medis, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, akan memberikan kemudahan daya jangkau masyarakat, terutama warga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan terhadap bayi, anak dan ibu agar dapat memberikan pelayanan kehamilan dan persalinan yang memadai.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS

3.2.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia**”.

Penelaahan terhadap Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menghasilkan pokok-pokok visi sebagai berikut :

Model Negeri ; bermakna menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas melayu. **Maju** ; bermakna adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai

meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi priode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan. **Makmur** ; bermakna meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

3.2.2 Misi

Berdasarkan visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 perumusan misinya sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang reformatif, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pewujudan ide-ide baru gagasan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kewilayahan (*spatial strength*) suatu kondisi yang ingin dicapai dalam misi ini.

Misi Kedua : Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.

Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi sektoral, pembangunan dan pemberdayaan manusia yang berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Misi Ketiga : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Tersedianya prasarana dan sarana konektivitas wilayah dan pemukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan ruang yang baik, pelestarian lingkungan hidup dan

penanggulangan potensi masalah lingkungan di Kabupaten Bengkalis suatu tujuan pada misi ini.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka yang menjadi penekanan pada Misi ke-2 yakni ” **Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat** ” dengan tujuan Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang memiliki sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui arah dan kebijakan meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat serta meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi yang akan dicapai dengan indikator kinerja sasaran ;

- 1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
- 2) Angka Kematian Ibu (AKI) per KLH;
- 3) Angka Kematian Bayi (AKB) per KLH; 3).
- 4) Prevalensi Penyakit Menular; Penyakit TB Paru, Demam Berdarah Dengue, HIV/AIDS, dan Malaria
- 5) Prevalensi Penyakit Tidak Menular; Penyakit Tekanan Darah Tinggi, Kanker Serviks dan Payudara serta Gangguan Jiwa;
- 6) Penduduk memiliki jaminan kesehatan
- 7) Status gizi balita : balita gizi baik dan balita gizi kurang
- 8) Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(STBM)
- 9) Desa ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

1. Faktor Penghambat : sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum sesuai standar; Perilaku dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat belum optimal; masih adanya

disparitas kuantitas, kualitas dan sebaran SDM kesehatan belum optimal;

2. Faktor Pendorong : Komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan; akuntabilitas SDM kesehatan untuk melaksanakan tugas di bidang profesinya; dukungan pembiayaan bagi insentif bagi tenaga kesehatan; dukungan legislatif dalam hal regulasi dan penganggaran pembangunan kesehatan; kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkeadilan; Peran serta sektor swasta dalam upaya peningkatan pembangunan kesehatan; Adanya pengembangan suatu Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan yang mencakup total coverage.

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong**”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Tujuan Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan untuk mencapai tujuan Visi dan Misi meliputi ;

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi

Agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan dengan 9 agenda prioritas pada Kabinet Kerja, yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. **Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.**
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk bidang kesehatan berada pada Nawa Cita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia sangat selaras dengan tujuan peningkatan status kesehatan masyarakat pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Sedangkan untuk mempercepat dan fokus arah peningkatan derajat kesehatan melalui implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Permenkes Nomor 39 Tahun 2016) bertujuan untuk ;

- a. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan

promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;

- b. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
- c. mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- a. Penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*);
- c. Penanggulangan penyakit menular; dan
- d. Penanggulangan penyakit tidak menular

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:

- a. Keluarga mengikuti program keluarga berencana (kb);
- b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- d. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;

- j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
- l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dilaksanakan untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Untuk peningkatan kualitas dan pencapaian indikator sasaran telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 dengan indikator ;

- a. Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar
- b. Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar
- c. Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- d. Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- e. Pelayanan kesehatan usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 60 tahun ke atas mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Sesuai Standar
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai Standar
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar

3.3.2 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2019

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2014-2019 telah dirumuskan selaras dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, sebagai berikut: “ **Dinas Kesehatan sebagai institusi profesional dalam mewujudkan kesehatan yang berkualitas sebagai upaya peningkatan usia harapan hidup masyarakat Riau** ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Profesional ; mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan berdasarkan norma dan etika yang berlaku untuk mencapai hasil yang bermutu dan berkualitas.

Berkualitas ; Kesempurnaan dari sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang menjamin tercapai suatu harapan/tujuan

Usia Harapan Hidup ; umur maksimal yang diperkirakan dari individu sebagai indikator tingkat kesehatan di provinsi riau.

Memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014–2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pelayanan esehatan profesional, terjangkau, terpadu, bermitra, dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak;
4. Meningkatkan status gizimasyarakat;
5. Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif dengan pendekatan lingkungan sehat berbasis masyarakat;

6. Mengembangkan sumberdayakesehatan yang bermutu dan berkualitas;
7. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keamanan obat dan logistik kesehatan serta menjamin keamanan produksi dan distribusi makanan/minuman;
8. Mengembangkan system manajemen dan Informasi kesehatan yang professional transparan, berdayaguna dan berhasilguna;
9. Mengembangkan Sistem Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas kesehatan sebagai regulator dan pembinaan bidang kesehatan di Provinsi Riau.

Tujuan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau bidang kesehatan tahun 2014-2019 adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam rumusan misi yaitu ;

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, terjangkau dan merata.
2. Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat dari penyakit tidak menular serta tertanggulangnya wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa.
3. Meningkatnya ketersediaan obat & vaksin yang bermutu, terjangkau dan merata sesuai kebutuhan masyarakat serta pengawasan sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan yang beredar dimasyarakat
4. Meningkatnya kualitas hidup ibu melahirkan dan anak balita
5. Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya penanggulangan krisis kesehatan secara cepat dan tepat.
7. Meningkatnya perilaku dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

8. Meningkatnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan system kesehatan ke wilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
9. Meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, terjangkau dan merata
10. Meningkatnya ketersediaan, mutu dan pemerataan distribusi sumberdaya kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai kebutuhan
11. Meningkatnya ketersediaan kebijakan publik berwawasan kesehatan.
12. Meningkatnya pelaksanaan system administrasi kesehatan yang berbasis teknologi informasi

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan.
3. Peningkatan manajemen kesehatan dan sistem regulasi bidang kesehatan
4. Ketersediaan sarana kefarmasian dan vaksin.
5. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan

Renstra SOPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 telah terakomodir kedalam Renstra SOPD Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 – 2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015 – 2019 keselarasan mencakup tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan, indikator kinerja dan target sedangkan isu-isu strategis berpedoman pada kinerja pelayanan SKPD dan Isu-Isu Strategis RPJMD 2016 – 2021.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Rencana Strategis ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yaitu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional; merupakan tugas dan tanggung jawab SOPD Dinas Kesehatan; mempunyai dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan; dan kemudahannya untuk dikelola.

Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategis 2015-2019 menetapkan isu-isu strategis adalah ;

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia
2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat
3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas
5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan
6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi
9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

Sedangkan isu-isu strategis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau antara lain ;

1. Pelayanan Kesehatan
2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
4. Obat dan Kefarmasian
5. Sumber Daya Kesehatan

6. Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 telah menetapkan isu-isu strategis urusan kesehatan berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal serta pencapaian pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan yaitu ;

1. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat.
2. Peningkatan kasus penyakit menular disertai perkembangan penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan.
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan preventif dan promotif.
4. Perkembangan pola manajemen dan efektifitas pembiayaan BLUD bagi RSUD dan FKTP.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan pertama belum terakreditasi.
6. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan secara kuantitas dan kualitas di fasilitas kesehatan.
7. Ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin sesuai kebutuhan belum sesuai ketentuan berlaku.

Berdasarkan isu-isu strategis Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis memperhatikan isu-isu nasional dan regional serta isu-isu strategis berdasarkan capaian pelayanan kesehatan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian indikator Renstra periode sebelumnya, capaian indikator MDG's, perubahan tugas pokok dan fungsi, Isu-isu Dinas Kesehatan diambil dari isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis yang mencerminkan kondisi pelayanan kesehatan sebagai berikut ;

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ; persalinan di fasilitas kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani, pelayanan kesehatan bayi, ibu hamil mendapat pelayanan kehamilan paling sedikit 4 kali sesuai standar, bayi baru lahir

(neonatus) umur 0-28 hari komplikasi yang ditangani sesuai standar, pelayanan kesehatan balita (12-59 bulan), peserta kb aktif pada pasangan usia subur;

2. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Peningkatan Penyakit Tidak Menular Menular Dan Penyehatan Lingkungan; penemuan dan pengendalian penyakit TB BTA(+); bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap; penderita pneumonia balita; penemuan penderita diare pada balita; sanitasi total berbasis masyarakat di kelurahan/desa; sarana air minum memenuhi syarat kesehatan; sarana pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan; pelayanan kesehatan penderita tekanan darah tinggi; kelurahan/desa melaksanakan posbindu; deteksi dini kanker servik dan payudara; dan kesehatan jiwa.
3. Pengendalian Sistem Kewaspaan Dini Gizi Dan Perbaikan Gizi Masyarakat Gizi Kurang (Stunting dan Wasting); Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan; Balita dengan kasus gizi buruk; Ibu Hamil Kurang Energi Kronis mendapat Pemberian Makanan Tambahan; Balita gizi kurang mendapatkan makanan tambahan; ASI eksklusif pada bayi kurang 6 bulan;
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Serta Pelayanan Jaminan Kesehatan ; pelayanan masyarakat miskin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar; pelayanan masyarakat miskin di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; pengembangan pelayanan jaminan pelayanan kesehatan; pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas; pelayanan kesehatan lansia;
5. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ; desa siaga aktif; pelayanan kesehatan siswa usia sekolah; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga; meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan; pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan;

6. Peningkatan, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan ; kecukupan dan distribusi tenaga kesehatan ; pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan; peningkatan pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu ; peningkatan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan; akreditasi puskesmas;
7. Peningkatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan ; ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas; pelayanan kefarmasian sesuai standar; penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan; pembinaan peredaran obat dan vaksin di masyarakat;
8. Peningkatan program penunjang dan pengembangan kesehatan; pelayanan kesehatan kerja dasar; pelayanan kesehatan olah raga; pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;

BAB IV

VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2021 seperti telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DAERAH (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dengan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia”**.

Berdasarkan visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 perumusan misi adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : *Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.*

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang reformatif, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pewujudan ide-ide baru gagasan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kewilayahan (*spatial strength*) suatu kondisi yang ingin dicapai dalam misi ini.

Misi Kedua : *Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.*

Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi sektoral, pembangunan dan pemberdayaan manusia yang berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Misi Ketiga : *Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.*

Tersedianya prasarana dan sarana konektivitas wilayah dan pemukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan ruang yang baik, pelestarian lingkungan hidup dan

penanggulangan potensi masalah lingkungan di Kabupaten Bengkalis suatu tujuan pada misi ini.

Memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Bengkalis, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, sinkronisasi Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan perkembangan, isu-isu strategis berbagai kecenderungan masalah kesehatan kedepan maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 menetapkan **Visi** yaitu **“Terwujudnya Kemajuan Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis”** dengan penjelasan makna dari visi yang telah ditetapkan sebagai berikut ;

*Pertama, **Kemajuan Pembangunan*** memiliki makna Mewujudkan pembangunan kesehatan dengan kemampuan yang dimiliki memajukan pelayanan kesehatan dari akses fasilitas dan kualitas layanan kesehatan, ketersediaan pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan kompetensi, ketersediaan jaminan pelayanan kesehatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, mampu mengenal masalah kesehatan secara mandiri serta melakukan tatakelola administrasi, kinerja aparatur dan pemerintahan yang baik mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan sehingga dapat menjadi wujud pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

*Kedua, **Kesehatan Masyarakat*** memiliki makna adalah pembangunan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia khususnya guna pembangunan kesehatan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujudnya generasi pemimpin yang berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ditetapkan **Misi** yang menjadi pedoman lima tahun kedepan adalah ;

1. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas tanpa membedakan kesenjangan sosial ekonomi maupun geografis, untuk itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk masyarakat miskin harus merata, terjangkau, bermutu dan berkesinambungan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Peningkatan status kesehatan masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia khususnya guna pembangunan kesehatan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal;

Pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, akan terpenuhi apabila ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan juga bermutu, merata dan terjangkau dan fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi dengan menggunakan prosedur-prosedur yang telah terakreditasi. pembinaan dan pengendalian bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dan sektor terkait lainnya dengan potensi yang dimiliki kemitraan diwujudkan dalam suatu jejaring agar diperoleh sinergitas yang mantap, untuk itulah diperlukan adanya penggerakkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Mengelola sumberdaya

pendanaan kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien, untuk pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menekankan pada kemandirian masyarakat.

3. Mewujudkan sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan berdasarkan data, fakta dan informasi (*evidence based*) dan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi, dimana setiap program saling terkait dan saling menunjang berdasarkan kebutuhan riil dan permasalahan di masyarakat. Salah satu upaya untuk mendapatkan data, fakta dan informasi yang tepat untuk perencanaan di bidang kesehatan adalah mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan tata kelola administrasi, penatausahaan keuangan dan tatakelola aset serta akuntabilitas kinerja yang baik untuk peningkatan pelayanan publik.

Gambar 4.1 Hubungan Visi dan Misi

	RPJMD	RENSTRA
Visi	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia	Terwujudnya Kemajuan Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis
Misi 1	Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat yang berkualitas
Misi 2	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal
Misi 3	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.	Mewujudkan sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan suatu upaya dengan fokus untuk mencapai Misi 2 RPJMD Kabupaten Bengkalis yang bertujuan meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan arah dan kebijakan meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat serta meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.

Namun demikian Misi 3 Renstra Dinas kesehatan suatu bentuk dukungan untuk mencapai Misi 1 RPJMD Kabupaten Bengkalis mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

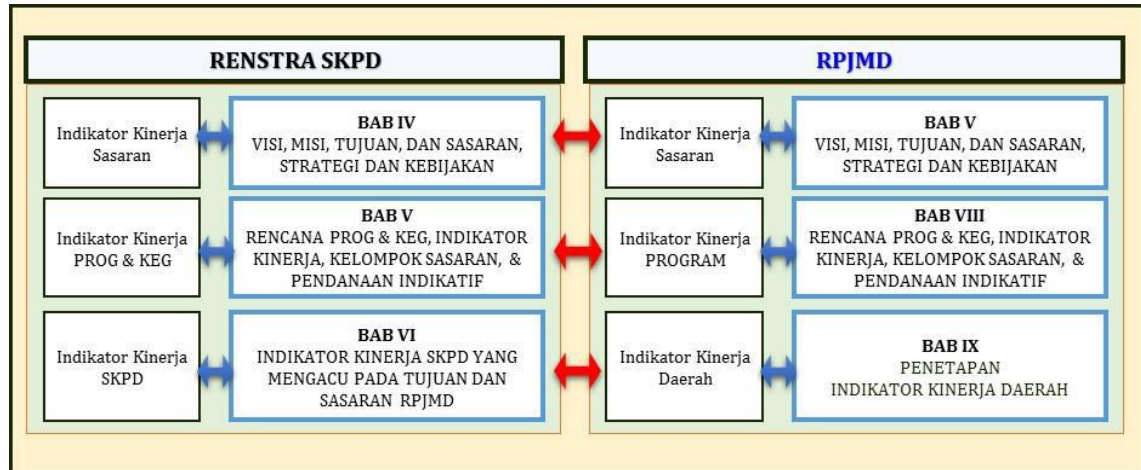
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi 2 RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Renstra Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 4.2

Gambar 4.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan merupakan suatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sedangkan sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah dijabarkan pada Misi 1 sampai dengan Misi 3 Dinas Kesehatan kedalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET KINERJA TAHUN						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70.6	70.6	70.8	70.9	71.03	71.1	71.2	
	1.2. Angka Kematian Bayi (AKB)		1.2. Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KLH	24	24	22	17	12	7	2	
	1.3. Angka Kematian Ibu (AKI)		1.3. Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KLH	135	135	130	125	120	115	110	
	1.4. Penurunan Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular		1.4. Prevalensi Penyakit Menular									
			1.3.1. Angka Prevalensi Penyakit TB Paru	per 100.000	88	85	83	81	79	77	75	
			1.3.2. Angka Prevalensi Penyakit Demam Berdarah Dengue	per 100.000	125	125	105	95	75	65	45	
			1.3.3. Angka Prevalensi Penyakit HIV/AIDS (Persentase)	%	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
			1.3.4. Angka Prevalensi Penyakit Malaria	per 1000	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
			1.5. Prevalensi Penyakit Tidak Menular									
			1.4.1. Angka Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi	per 1000	37	35	32	29	27	25	23	
			1.4.2. Angka Prevalensi Penyakit Kanker Serviks dan Payudara	per 1000	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET KINERJA TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1.4.3 Angka Prevalensi Penyakit /Gangguan Jiwa	per 1000	1	1	1	1	1	1	1
			1.6. Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	N/A	12	35	65	88	95	100
			1.7. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	85	85	87	89	90	91	92
			1.8. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	75	80	85	90	95	100
			1.9. Persentase Puskesmas memiliki minimal 8 jenis tenaga kesehatan	%	72	72	78	84	90	96	100
2. Meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan, serta perilaku hidup bersih dan sehat	2.1. Persentase penduduk memiliki Jaminan Kesehatan	2. Meningkatkan pemerataan pelayanan dan jaminan kesehatan	2.1. Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan	%	79	80	81	83	85	86	87
			2.2. Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan	%	93	90	93	95	96	97	98
	2.3. Persentase bayi mendapatkan Imunisasi dasar lengkap		%	92	92	93	94	95	96	97	
	2.4. Persentase status gizi balita										
	2.4.1 Persentase Gizi Baik pada Balita		%	88	90	91	91	92	92	93	
	2.4.2 Persentase Prevalensi Gizi Kurang pada Balita		%	9.5	9.5	9	8.5	8	7.5	7	
	2.5. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan		%	70	70	75	80	85	90	95	
	2.6. Persentase penduduk memiliki Jaminan Kesehatan		%	23	23	31	59	68	79	91	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET KINERJA TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			2.7 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	%	90	90	91	92	93	94	95
			2.8 Persentase penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	%	90	90	92	94	95	97	98
			2.9 Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	42	42	49	57	64	71	79
			2.10 Persentase Desa Ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	%	65	65	70	75	80	85	85
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	3.1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	3.1. Predikat akuntabilitas kinerja	Predikat	C	CC	CC	B	B	BB	BB
			3.2. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan aset dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

No.	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase balita gizi buruk	%	2,5	2	1,5	1	0,5	0,1
			Rasio posyandu per balita	per 100	1	1,5	2	2,5	3	3,5
			Rasio puskesmas per penduduk	per 100.000	3	3,5	4	4,5	5	5,5
			Rasio pustu per penduduk	per 100.000	10	11	12	13	14	15
			Rasio Rumah Sakit per penduduk	per 100.000	1	1	1	1	1	2
			Persentase fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin	%	70	75	85	90	95	100
			Persentase tenaga kesehatan yang dievaluasi pasca pelatihan	%	75	80	85	90	95	100
			Persentase hasil evaluasi kualitas SDM kesehatan	%	80	81	82	83	84	85
			Persentase tenaga dan sarana kesehatan dinilai tenaga kesehatan teladan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Puskesmas yang menggunakan jaringan data komputasi	%	30	41	59	71	88	100
			Rasio dokter per satuan penduduk :							
			Dokter umum	per 100.000	24	31	38	45	46	47
			Dokter spesialis	per 100.000	8	9	10	11	12	13
			Dokter gigi	per 100.000	10	11	12	13	14	15
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk :							
			Bidan	per 100.000	70	80	90	100	110	120
			Perawat	per 100.000	85	90	100	110	120	130
	Apoteker	per 100.000	2	4	6	8	10	12		

No.	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Ahli gizi	per 100.000	3	5	7	9	11	13
			Kesmas	per 100.000	6	8	10	12	14	16
			Sanitarian	per 100.000	2	4	6	8	10	12
	Meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatnya pemerataan pelayanan dan jaminan kesehatan	Persentase pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan Makanan	%	80	82	84	86	88	90
			Cakupan Puskesmas yang melaksanakan program Perkesmas	%	65	70	75	80	85	85
			Cakupan pelayanan kesehatan peserta jamkesmasda	%	75	80	85	90	95	100
			Cakupan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan	%	90	92	94	96	98	100
			Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan Puskesmas	%	90	92	94	95	97	98
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	75	80	85	90	95	100
			Cakupan Puskesmas yang menerima Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) 100%	%	94	98	100	100	100	100
			Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I, VII dan X	%	75	80	85	90	95	100
			Cakupan promosi dan informasi media kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan rumah tangga melaksanakan PHBS	%	65	70	75	80	85	90
			Cakupan desa siaga Aktif	%	60	60	66	72	76	80
			Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan penyakit menular minimal 2%	%	3	5	7	9	11	13
			Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	%	65	75	80	85	90	95
			Cakupan Balita gizi kurang (Kurus) yang mendapat makanan tambahan	%	75	80	85	90	95	100
	Cakupan pertemuan integrasi program gizi, kia dan promkes	%	100	100	100	100	100	100		

No.	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD	%	55	60	65	70	75	80
			Cakupan peralatan laboratorium kesehatan lingkungan sesuai standar	%	75	80	85	90	95	100
			Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan memenuhi syarat kesehatan	%	42	45	50	55	60	65
			Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat 100%	%	75	80	85	90	95	100
			Cakupan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) memenuhi syarat kesehatan	%	40	45	50	55	60	65
			Cakupan tempat pengelola makanan dan minuman (TPM) memenuhi syarat kesehatan	%	20	25	30	35	40	45
			Cakupan Puskesmas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	%	12	28	44	65	82	100
			Cakupan anak murid kelas 1,2 dan 3 mendapatkan imunisasi	%	90	90	92	94	96	98
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	%	75	76	77	78	79	80
			Cakupan penderita pneumoni pada balita yang ditemukan dan diobati	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan penderita kusta baru tanpa cacat ditemukan	%	95	96	97	98	99	100
			Cakupan penduduk usia 2 - 65 tahun minum obat POMP Filariasis	%	85	85	85	85	85	85
			Cakupan penderita diare pada balita yang ditemukan dan diobati	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan kasus HIV AIDs yang ditemukan mendapatkan obat anti retroviral	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan kasus gigitan HPR mendapatkan vaksin VAR	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	%	100	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Cakupan Jemaah Calon Haji (JCH) yang dilakukan pemeriksaan kesehatan selama 3 bulan	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan penderita malaria positif yang temukan	%	70	71	72	73	74	75
			Cakupan penderita AFP kurang dari 2 per 100.000 penduduk	Per 100.000	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
			Cakupan penemuan dan penanganan kasus campak	%	15	15	15	15	15	15
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	%	15	18	20	24	30	35
			Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	25	30	35	40	45	50
			Cakupan kelompok lansia dibina	%	75	80	85	90	95	100
			Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	42	45	48	51	54	57
			Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan anak balita	%	70	75	80	85	90	95
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	70	74	77	80	82	85
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	92	93	95	96	97
			Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan bayi	%	90	93	95	96	97	98
			Cakupan pelayanan antenatal care (ANC) ibu hamil minimal 4 kali (K4) sesuai standar	%	90	91	92	93	94	95
			Cakupan Puskesmas melaksanakan P4K pada ibu hamil	%	24	41	65	80	88	95
			Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan olah raga	%	20	30	33	56	78	100
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	%	15	25	33	56	78	100
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	%	29	30	33	56	78	100

No.	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan	%	70	75	80	85	90	95
			Cakupan peningkatan kinerja aparatur 95%	%	90	91	92	93	94	95
			Cakupan tertib administrasi barang milik daerah dinas kesehatan 100%	%	75	80	85	90	95	100
			Cakupan laporan realisasi anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan peningkatan kualitas penyusunan program sesuai peraturan	%	80	83	86	89	92	95
			Cakupan nilai evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan dengan nilai BB	%	CC	CC	B	B	BB	BB
			Cakupan peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan	%	90	91	92	93	94	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkulu 2016-2021 untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata menyusun strategi untuk dilaksanakan sesuai Misi Rencana Strategis telah dijabarkan pada Tabel 5.1

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan, secara adil dan merata dengan arah kebijakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kemajuan Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu			
Misi 1 : Mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1. Peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; 3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 4. Meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan;

			<p>5. Memperkuat manajemen, pengembangan, dan sistem informasi;</p> <p>6. Meningkatkan ketersediaan dan penyebaran tenaga kesehatan</p>
--	--	--	---

Misi 2 : Menjamin pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan, serta perilaku hidup bersih dan sehat	1. Meningkatnya pemerataan pelayanan dan jaminan kesehatan	1. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	<p>1. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;</p> <p>2. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;</p> <p>3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;</p>
		2. Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan	<p>1. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan;</p> <p>2. Memantapkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional</p>
		3. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

Misi 3 : Mewujudkan sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1. Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan keuangan	1. Peningkatan tatakelola dan manajemen pemerintahan yang baik	1. Mewujudkan tata kelola manajemen yang akuntabel
		2. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	2. Meningkatkan pengembangan dan mutu sumber daya manusia kesehatan;

		3. Peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan ketaatan pada peraturan	3. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan laporan pengawasan dan kinerja
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program dan kegiatan prioritas RPJMD, program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, kegiatan lintas perangkat daerah dan kegiatan lintas program perangkat daerah. Program prioritas RPJMD dan program prioritas perangkat daerah saling bersinergis untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD, demikian pula dengan indikator kinerja sasaran RPJMD dan indikator kinerja sasaran OPD. Rencana Strategis periode tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis yang maju dan makmur di Indonesia maka akan dituangkan pula Indikator Kinerja Utama di urusan kesehatan yang dapat menjadi daya ungkit capaian Indikator Kinerja Utama di Tingkat Kabupaten.

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 merupakan rencana kerja tahunan, yang saling selaras dengan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Riau demikian juga halnya dengan indikator kinerja sasaran program kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab				
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)					
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
1.	Meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur kesehatan	Cakupan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan 95%	05	001	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan	65	70	1.900	75	1.995	80	2.095	85	2.199	90	2.309	95	2.425	95	12.924				
					002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga kesehatan mengikuti sosialisasi	N/A	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	900	
					049	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)	Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan teknis fungsional	N/A	150	15	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	765
					086	Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen data tenaga kesehatan yang berkualitas	1 Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					119	Pengembangan pendayagunaan SDM Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mengikuti analisis jabatan dan beban kerja	N/A	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	300
	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas minimal 92%	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	80	85	9.372	87	9.559	89	9.751	90	9.946	91	10.145	92	10.347	92	59.120						

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia di Puskesmas	90	192	197	201	203	206	208	208							
					002	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang tersedia obat dan perbekalan kesehatan	151	151	155	159	167	175	184	184							
					008	Pembinaan dan Pengawasan obat dan Makanan	Persentase pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan Makanan	N/A	80	82	84	86	88	90	90							
							Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan	N/A	65	75	85	95	100	105	105							
					16	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio posyandu per satuan balita	1	1	600	1,5	630	2	662	2,5	695	3	729	3,5	766	4.081	
					009	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah posyandu balita aktif	459	459	464	468	472	476	480	480							
					20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,01	2,5	256	2	269	1,5	282	1	296	0,5	311	0,1	327	0,1	1.741
					001	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Persentase balita status gizi kurang	9,5	9,5	9	8,5	8	7,5	7	7							
							Laporan balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang	1		1	1	1	1	1	1							
					23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang dievaluasi pasca pelatihan	N/A	75	2.331	80	2.448	85	2.570	90	2.698	95	2.833	100	2.975	100	15.855
					002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dievaluasi selesai mengikuti pelatihan /pasca pelatihan	N/A	50	60	70	80	90	100	100							

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Cakupan hasil evaluasi kualitas SDM kesehatan	006	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Persentase hasil evaluasi kualitas SDM kesehatan Jumlah dokumen laporan evaluasi kualitas SDM kes	N/A	80		81		82		83		84		85		85		
			Cakupan tenaga dan sarana kesehatan dinilai tenaga kesehatan teladan	017	Penilaian dan Penghargaan Saran Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan	Persentase tenaga dan sarana kesehatan dinilai tenaga kesehatan teladan Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan	100	100	100		100		100		100		100		100		100	
			Cakupan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin 100%	018	Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring prizinan yankese	Persentase Fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin Jumlah fasilitas kesehatan memiliki sertifikat izin Jumlah tenaga kesehatan memiliki sertifikat izin	30	70	75		85		90		95		100		100		100	
			Cakupan Puskesmas yang menggunakan jaringan data komputasi	019	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Persentase Puskesmas yang menggunakan jaringan data komputasi Jumlah Puskesmas menggunakan aplikasi data komputasi	30	30	41		59		71		88		100		100		100	
			Cakupan Puskesmas Terakreditasi 100%	021	Pelaksanaan akreditasi Puskesmas	Persentase Puskesmas Terakreditasi Jumlah Puskesmas di akreditasi	N/A	12	35		65		88		95		100		100		100	
							N/A	2	6		10		14		15		17		17		17	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Rasio tenaga medis dan paramedis per penduduk :	022	Penyusunan perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan	Angka jenis tenaga dokter dan paramedis difasilitas kesehatan sesuai standar Jumlah jenis tenaga kes sesuai standar minimal 7 jenis nakes	7 7	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8		
			Persentase Puskesmas memiliki peralatan kesehatan kesehatan sesuai standar	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas memiliki peralatan kesehatan kesehatan sesuai standar	3	75	15.497	80	17.047	85	18.751	90	20.627	95	22.689	100	24.958	100	119.569	
				006	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar	20 Set	25		30		35		40		45		50		50		
			Rasio puskesmas 5,5 per 100.000 penduduk Rasio pustu 12,5 per 100.000 penduduk	025	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Angka Puskesmas per satuan penduduk Angka Puskesmas Pembantu per satuan penduduk Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas	3 10 16	3 10 1	3,5 10,5 3	- 11 3	4 11 3	- 11,5 3	4,5 12 3	- 12 3	5 12,5 3	- 12,5 3	5,5 12,5 3	- 12,5 3	5,5 12,5 32	- 12,5 32		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
						Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu	58	1		2		3		3		3		3		73		
			Rasio Rumah Sakit 2 per 100.000 penduduk	26	Program Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Angka Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1	1	3.749	1	18.460	1	34.575	1	50.690	1	66.805	2	82.920	2	257.199	
				001	Pembangunan rumah sakit	Jumlah pembangunan rumah sakit	7	1		1		1		1		1		2		9		
			Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KLH	32	Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KLH	5	24	330	22	363	17	399	12	439	7	483	2	531	2	2.546	
			Angka Kematian Ibu (AKI) 110 per 100.000 KLH			Angka Kematian Ibu (AKI) 110 per 100.000 KLH	135	135		130		125		120		115		110		110		
				003	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Jumlah kasus kematian bayi 0 - 11 bulan dilaporkan	60	55		50		45		40		35		30		25		
						Jumlah kasus kematian ibu maternal dilaporkan	15	14		13		12		11		10		9		9		
	Meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan,	Meningkatnya pelayanan dan jaminan kesehatan	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan Puskesmas	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	90	90	70.048	92	73.550	94	77.228	95	81.089	97	85.144	98	89.401	98	476.460	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab				
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)					
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
serta perilaku hidup bersih dan sehat					025	Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas	86.052	86.052		87.773		89.529		91.319		93.146		95.009		90.091					
						Cakupan pelayanan kesehatan peserta jamkesmasda	028	Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)	Persentase pelayanan kesehatan peserta Jamkesmasda di fasilitas kesehatan Jumlah yankes dasar Jamkesmasda di fasilitas kesehatan	75	75		80		85		90		95		100		100			
						Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	030	Pelayanan kesehatan rujukan	Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di fasilitas kesehatan tingkat pertama Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk ke fasilitas kesehatan strata I	56	75		80		85		90		95		100		100		100	
						Cakupan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan	032	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persentase pelayanan kesehatan peserta JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah peserta BPJS yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	90	90		92		94		96		98		100		100		100	
					033	Pendamping Pelaksanaan Kegiatan JKN oleh Daerah	Jumlah peserta BPJS yang dirujuk ke pelayanan kesehatan rumah sakit strata I	5.752 Orang	5.177		5.292		5.407		5.522		5.637		5.752		5.752					

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Cakupan Puskesmas yang melaksanakan program Perkesmas 85%	034	Perawatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas melaksanakan program Perkesmas Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Perkesmas	N/A 11	65 11		70 12		75 13		80 14		85 15		85 16		16		
			Cakupan Puskesmas yang menerima Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) 100%	035	Penyediaan bantuan operasional kesehatan	Persentase Puskesmas yang memperoleh dana BOK Jumlah puskesmas menggunakan dana bantuan operasional kesehatan	94 11	100 16		100 17		100 18		100 19		100 20		100 21		100 21		
			Cakupan Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat		Pembinaan kesehatan olahraga	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga Jumlah kesehatan olah raga kelompok masyarakat di bina	- -	20 8		30 11		40 15		50 19		60 23		70 27		70 27		
			Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar		Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar	Persentase Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan kerja Jumlah Puskesmas menerapkan K3 internal dan pemeriksaan kesehatan pekerja	- -	40 7		50 9		60 10		70 12		80 14		90 16		90 16		
			Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan		Pembinaan Kesehatan Tradisional	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan kesehatan tradisional	-	15		25		45		55		65		75		75		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			tradisional dan komplementer			Jumlah kelompok upaya kesehatan tradisional yang dibina	-	11		18		31		38		45		52		52		
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan jiwa	-	29		47		59		71		88		95		95		
			Cakupan Desa ber PHBS 85%	19	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa ber PHBS	65	65	1.677	70	1.761	75	1.849	80	1.941	85	2.038	85	2.140		11.407	
				001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah desa melakukan kegiatan PHBS	88	88		95		102		109		116		106		106		
			Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I, VII dan X	006	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)	Persentase peserta didik kelas I, VII dan X mendapat pemeriksaan kesehatan Jumlah pemeriksaan kesehatan anak didik kelas I, VII dan X oleh tenaga kesehatan	97	75		80		85		90		95		100		100		
							81.886	109.181		114.640		120.372		126.391		132.710		139.346		139.346		
			Cakupan promosi dan informasi media kesehatan 100%	008	Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Persentase pengembangan promosi dan informasi media kesehatan		100		100		100		100		100		100		100		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan penyakit menular minimal 2%			Jumlah promosi kesehatan melalui media	35	35	45	54	60	65	70	70								
			Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan penyakit menular minimal 2%	016	Penyuluhan tentang pemberantasan penyakit menular	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan penyakit menular	2	2	3	5	7	9	11	11								
						Jumlah promosi kesehatan penyakit menular yang dilaksanakan di masyarakat	N/A	-	100 kali	110 kali	120 kali	130 kali	140 kali	140 kali								
			Cakupan desa siaga Aktif 80%	018	Pembantuan desa siaga dan pembinaan fasilitator desa siaga	Persentase Desa Siaga Aktif	60	60	60	66	72	76	80	80								
			Cakupan rumah tangga melaksanakan PHBS 90%	020	Pembinaan rumah tangga ber PHBS	Jumlah desa siaga aktif	71	93	93	102	112	118	124	124								
								Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS	65	65	70	75	80	85	90	90						
			Cakupan Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	20	002	Pemberian tambahan makan dan vitamin	Jumlah rumah tangga ber PHBS dibina	N/A	94.278	102.135	109.992	117.849	125.706	133.563	133.563							
									Persentase Balita gizi kurang (kurus) mendapat makanan tambahan	N/A	75	80	85	90	95	100	100					
			Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	003	Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang Vit A dan kekurangan	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan	N/A	65	75	80	85	90	95	95								

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
						zati gizi mikro lainnya	Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	54	54		59		62		65		69		72		69	
						Cakupan pertemuan integrasi program gizi, kia dan promkes	Persentase pertemuan integrasi program gizi, kia dan promkes Jumlah peserta pertemuan integrasi	100	100		100		100		100		100		100		100	
						Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100		100		100		100		100		100		100	
						Cakupan rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD 80%	Persentase rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD	55	55	4.700	60	5.170	65	5.687	70	6.256	75	6.881	80	7.569		36.263
						Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan jentik DBD	86.421	89.564		94.278		98.992		103.941		109.139		114.595		114.595	
						Cakupan operasional laboratorium kesehatan lingkungan sesuai standar 100%	Persentase alat laboratorium kesehatan lingkungan sesuai standar Jumlah alat laboratorium kesehatan lingkungan yang tersedia	N/A	-		75		80		85		90		95		95	
						Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan 65%	Persentase sarana air minum memenuhi syarat kesehatan Jumlah sarana air minum yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan	N/A	42		45		50		55		60		65		65	
								19	19		27		35		43		51		59		59	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)		
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat 100%	020	Penyediaan air minum dan sanitasi dasar berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	Persentase penduduk menggunakan jamban sehat Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat	75 409.000	75 409.000	80 430.600	85 440.400	90 460.400	95 483.400	100 518.000	100 518.000									
			Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS)	021	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemucian SBS & CTPS	47 47	57 57	67 67	77 77	87 87	97 97	107 107	107 107									
			Cakupan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) memenuhi syarat kesehatan 65%	023	Pelayanan Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) memenuhi syarat kesehatan Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) memenuhi syarat kesehatan	40 N/A	40 256	45 270	50 284	55 298	60 312	65 326	65 326									
			Cakupan tempat pengelola makanan dan minuman (TPM) memenuhi syarat kes	024	Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)	Persentase tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman yang diperiksa	20 N/A	20 233	25 258	30 283	35 308	40 333	45 358	45 358									
			Cakupan Puskesmas melaksanakan pengelolaan lingkungan	025	Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas	Persentase Puskesmas melakukan pengelolaan lingkungan hidup	N/A	0	0	28	44	65	85	85									

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			hidup 100%			Jumlah Puskesmas melakukan pengelolaan limbah	N/A	0		0		5		8		12		16		16		
			Cakupan anak murid kelas 1,2 dan 3 mendapatkan imunisasi	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan anak murid kelas 1,2 dan 3 mendapatkan imunisasi	90	90	7.565	90	8.322	92	9.154	94	10.069	96	11.076	98	12.184	98	58.369	
				004	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI mendapat imunisasi	39.882	39.882		39.882		40.680		41.493		42.323		43.170		43.170		
			Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	008	Peningkatan Imunisasi	Persentase bayi 0 - 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	92	92		93		94		95		96		97		97		
						Jumlah bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	10.762	10.934		11.043		11.154		11.265		11.378		11.492		11.492		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	014	Penanggulangan penyakit TB Paru Sistem DOTS	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru BTA Positif	45	75		76		77		78		79		80		80		
						Jumlah penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif	313	362		412		462		512		562		612		562		
						Jumlah penderita TB BTA Positif dan pengobatan lengkap sembuh (Success Rate)	265	307		350		393		435		478		520		520		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)		
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			Cakupan penderita pneumoni pada balita yang ditemukan dan diobati	015	Penanggulangan ISPA	Persentase pneumoni pada balita yang ditemukan dan diobati Jumlah penemuan dan penanganan penderita pneumoni pada balita	15 1102	100 1.565	100 2.222	100 3.155	100 4.481	100 6.362	100 9.035	100 9035									
			Cakupan penderita kusta baru tanpa cacat ditemukan	016	Penanggulangan P2 Kusta	Persentase penemuan penderita kusta baru tanpa cacat Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan	95 6	95 3	96 3	97 3	98 3	99 3	100 3	100 12									
			Cakupan penduduk usia 2 - 65 tahun minum obat POMP Filariasis	017	Penanggulangan P2 Filariasis	Persentase penduduk usia 2 - 65 tahun minum obat POMP Filariasis Jumlah penduduk usia 2 - 65 Tahun mendapatkan obat Filariasis	85 616.842	85 542.287	85 569.401	85 597.871	85 627.765	85 659.153	85 692.111	85 692.111									
			Cakupan penderita diare pada balita yang ditemukan dan diobati	018	Penanggulangan P2 Diare	Persentase penemuan dan penanganan kasus diare pada balita Jumlah penderita diare pada balita yang diobati	71 11.166	100 11.166	100 11.590	100 12.031	100 12.488	100 12.962	100 13.455	100 13.455									
			Cakupan kasus HIV AIDs yang ditemukan mendapatkan obat anti retroviral	019	Pelacakan kasus HIV AIDs sero survey	Persentase kasus HIV AIDs yang ditemukan mendapatkan obat anti retroviral Jumlah HIV AIDs ditemukan dan minum obat	3 3	100 3	100 3	100 3	100 3	100 3	100 3	100 3									
			Cakupan kasus gigitan HPR mendapatkan vaksin VAR	022	Pengendalian kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR)	Persentase penderita gigitan HPR mendapatkan vaksin VAR		100	100	100	100	100	100	100									

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
						Jumlah penderita kasus gigitan HPR mendapat Vaksin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30				
				026	Penanggulangan KLB/ Wabah Penyakit Menular dan Keracunan	Persentase KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
						Jumlah penanganan kasus KLB kurang dari 24 jam	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6					
				027	Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan Jemaah Calon Haji (JCH) yang dilakukan pemeriksaan kesehatan selama 3 bulan	Persentase pemeriksaan kesehatan Jemaah Calon Haji (JCH) selama 3 bulan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
						Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470		
				031	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit malaria	Persentase penderita malaria skrining positif yang temukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
						Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30					
				032	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio	Angka kasus AFP kurang dari 2 per 100.000 penduduk	1	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2		
						Jumlah kasus Positif AFP yang ditemukan	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
				033	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak	Persentase penemuan dan penanganan kasus campak	N/A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
						Jumlah pemeriksaan spesimen campak yang ditemukan positif campak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%		035	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	100 678	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	31	036	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Persentase penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi ditemukan	N/A 20297	15 3.045	18 3.136	20 3.230	24 3.327	30 3.427	35 3.529	35 3.529	35 3.529	35 3.529	35 3.529	35 3.529	35 3.529	35 3.529	35 3.529	19.693
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara		037	Pelayanan Pemeriksaan kanker serviks dan payudara	Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	< 1%	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
						Jumlah deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30 - 50 tahun	340	500	750	1000	1250	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	7000
		Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	29	012	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penatalaksanaan Asi Eksklusif dan Konseling Menyusui	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan Asi Eksklusif	39 5.833	42 5.189	671 5.345	45 5.345	692 5.505	48 5.505	713 5.670	51 5.670	734 5.840	54 5.840	756 6.015	57 6.015	779 6.015	57 6.015	4.345 6.015	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan anak balita		013	Pelayanan kesehatan anak balita	Persentase pelayanan kesehatan anak balita Jumlah anak balita 12 - 59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali	68 42.011	70 42.851		75 44.994	80 47.243		85 49.606	90 52.086		95 54.690		95 54.690			
			Cakupan kelompok lansia dibina 100%	30	001	Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Persentase posyandu lansia aktif Jumlah posyandu lansia dibina	75 75	75 75	228	80 80	239 85	251	90 264	95 277	100	291	100	1.551			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	32	004	Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan	90 10.911	91 11.061	4.367	92 12.054	5.375	93 12.108	6.069	95 12.350	6.555	96 12.474	7.079	97 12.598	7.645	97 12.598	37.090
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		005	Pendataan penjangkauan dan rujukan ibu hamil dan bayi risiko tinggi	Persentase komplikasi kebidanan dan neonatal yang ditangani di fasyankes Jumlah kasus komplikasi kebidanan yang ditangani difasilitas kesehatan Jumlah kasus neonatal komplikasi yang ditangani difasilitas kesehatan	66 1679 179	70 1.746 182		74 1.816 189		77 1.870 197		80 1.945 204		82 1.984 213		85 2.044 221		85 2.044 221	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Cakupan pertolongan persalinan difasilitas kesehatan		020 Pelayanan kesehatan jaminan persalinan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	79 8.733	80 8.925	81 10.911	83 11.020	85 11.241	86 11.353	87 11.466	87 11.466								
			Cakupan pelayanan antenatal care (ANC) ibu hamil minimal 4 kali (K4) sesuai standar		030 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) sesuai standar minimal 4 kali (K4) Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) sesuai standar di fasilitas kesehatan minimal 4 kali (K4)	93 11741	90 11.947	91 12.068	92 12.189	93 12.311	94 12.434	95 12.558	95 12.558								
			Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan bayi		032 Peningkatan Pelayanan kesehatan bayi	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali Jumlah bayi 0-11 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	93 10781	90 11.185	93 11531	95 11.762	96 11.997	97 12.237	98 12.482	98 12.482								
			Cakupan Puskesmas melaksanakan P4K pada ibu hamil		032 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Program P4K	N/A	24	41	65	80	88	95	95								

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
						Jumlah Puskesmas melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)		4		6		8		14		15		16		16		
	Meningkatnya tata kelola administrasi, sarana prasarana dan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian 100%	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100	100	7.128	100	7.128	100	8.485	100	10.182	100	12.218	100	14.662	59.803		
				001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	1.500	1500		1.500		1.800		2.160		2.592		3.110		3.110		
				002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya pembayaran komunikasi, air dan listrik	100	100		100		100		100		100		100		100		
				006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional / ambulance UPT roda empat yang diuruskan izinnya	45 Unit	45 Unit		45 Unit		45 Unit		45 Unit		45 Unit		45 Unit		45 Unit		
				008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan	17 item; 27 orang	17 item; 27 orang		17 item; 27 orang		17 item; 27 orang		17 item; 27 orang		17 item; 27 orang		17 item; 27 orang		17 item; 27 orang		
				010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	21 Item	21 Item		21 Item		21 Item		21 Item		21 Item		21 Item		21 Item		
				011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor	6 Item	6		6		6		6		6		6		6	
					015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/ majalah yang disediakan	6 terbitan	6		6		6		6		6		6		6	
					017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan	732 bok	732		732		732		732		732		732		732	
					019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang tersedia	35 Orang	35		35		35		35		35		35		35	
					028	Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	200 kali	200		550		550		550		550		550		550	
					033	Penyediaan jasa sopir	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan	19 Orang	19		20		20		20		20		20		20	
					034	Publikasi informasi pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	N/A	150		150		150		150		150		150		150	
			Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur 100%	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor	100	100	2310	100	2310	100	2369	100	2.843	100	3.411	100	4.094	100	13.343	
				003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung laboratorium kesehatan terpadu yang dibangun	N/A	-		-		1		-		-		-		1		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75			
					009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	N/A	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50			
					022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 kali	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
					024	Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	40 Unit	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
					028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	100 Unit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur	Cakupan peningkatan kinerja dan disiplin aparatur 95%		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase capaian kinerja dan disiplin aparatur	85	90	728	91	735	92	743	93	750	94	758	95	765	95	4.479	
					013	Penilaian kinerja PNS Tenaga Kesehatan	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	
					032	Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	
	Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan	Cakupan laporan realisasi anggaran dan tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan SKPD 100%		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan anggaran dan tindaklanjut hasil pemeriksaan aset dan keuangan	100	100	604	100	636	100	668	100	701	100	736	100	773	100	4.118	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan realisasi keuangan dan hasil tindak lanjut	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Cakupan tertib administrasi barang milik daerah dinas kesehatan 100%		010	Inventarisasi aset daerah	Persentase barang yang dicatat dan dilaporkan mendapat status nilai aset	75	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	-		
						Laporan inventaris barang kantor dinas kesehatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		Cakupan nilai evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan dengan nilai BB		011	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota	Hasil penilaian dan evaluasi kinerja SKPD Dokumen laporan capaian kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	C	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Cakupan peningkatan kualitas penyusunan program 95%		027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi program	80	80	83	86	89	92	95	95	95	95	95	95	95	95		
						Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi program	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
				028	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Rencana Strategis SKPD	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2		
		Cakupan peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan 95%		034	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Persentase tersedianya data dan informasi kesehatan berkualitas Dokumen laporan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	80	90	91	92	93	94	95	95	95	95	95	95	95	95		
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Penambahan luas tanah pemerintah	19	15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase penambahan tanah pemerintah	N/A			100		0		0		0		0		100	
				03	3	Pengadaan tanah untuk pembangunan pemerintah	Luas tanah (m2) yang diadakan untuk keperluan pembangunan gedung pemerintah	N/A	0		100		0		0		0		0		100	
TOTAL PAGU PENDANAAN									134.061		156.689		182.300		208.740		236.680		265.553		1.120.460	

6.2 RINCIAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS RPJMD

Tabel 6.2 Rencana Program Prioritas RPJMD, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)		
(4)	(5)	(6)															
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan	80	85	9.372	87	9.559	89	9.751	90	9.946	91	10.145	92	10.347	92	59.120
16	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio posyandu per satuan balita	1	1	70.648	1,5	74.180	2	77.889	2,5	81.784	3	85.873	3,5	90.167	3,5	480.542
		Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	90	90		92		94		95		97		98		98	
		Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)	56	75		80		85		90		95		100		100	
		Persentase pelayanan jaminan kesehatan di Fasilitas Kesehatan	90	90		92		94		96		98		100		100	
19	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peserta didik kelas I, VII dan X mendapat pemeriksaan kesehatan	97	75	1.677	80	1.761	85	1.849	90	1.941	95	2.038	100	2.140	100	11.407
		Persentase Desa Siaga Aktif	60	60		60		66		72		76		80		80	
		Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS	65	65		70		75		80		85		90		90	
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	2,5	2,5	2.281	2	2.395	1,5	2.515	1	2.641	0,5	2.773	0,1	2.911	0,1	15.515
		Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100		100		100		100		100		100		100	
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD	55	55	4.700	60	5.170	65	5.687	70	6.256	75	6.881	80	7.569	80	36.263
		Persentase sarana air minum memenuhi syarat kesehatan	N/A	42		45		50		55		60		65		65	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)		
(4)	(5)	(6)															
		Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	75	75		80		85		90		95		100		100	
		Desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS)	47	57		67		77		87		97		107		107	
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi 0 - 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	92	92	7.565	93	8.322	94	9.154	95	10.069	96	11.076	97	12.184	97	58.369
		Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru BTA Positif	45	75		76		77		78		79		80		80	
		Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100		100		100		100		100		100		100	
23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka jenis tenaga dokter dan paramedis difasilitas kesehatan sesuai standar	N/A	8	2.331	8	2.448	8	2.570	8	2.698	8	2.833	8	2.975	8	15.855
25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Angka Puskesmas per satuan penduduk	3	3	15.497	3,5	17.047	4	18.751	4,5	20.627	5	22.689	5,5	24.958	5,5	119.569
		Angka Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	10	10		10,5		11		11,5		12		12,5		12,5	
26	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Angka Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1	1	3.749	1	18.460	1	34.575	1	50.690	1	66.805	2	82.920	2	82.920
29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif	39	42	671	45	692	48	713	51	734	54	756	57	779	57	4.345
		Persentase pelayanan kesehatan anak balita	68	70		75		80		85		90		95		95	
30	Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	Persentase posyandu lansia aktif	75	75	228	80	239	85	251	90	264	95	277	100	291	100	1.551
32	Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KLH	5	24	4.697	22	5.167	17	5.683	12	6.252	7	6.877	2	7.565	2	36.240

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)		
(4)	(5)	(6)															
		Angka Kematian Ibu (AKI) 110 per 100.000 KLH	135	135		130		125		120		115		110		110	
		Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	91		92		93		95		96		97		97	
		Persentase komplikasi kebidanan dan neonatal yang ditangani di fasyankes	66	70		74		77		80		82		85		85	
		Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	93	90		93		95		96		97		98		98	

Tabel 6.3 Rencana Program Prioritas Renstra OPD, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(4)	(5)	(6)																
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai peraturan	80	85	9.372	87	9.559	89	9.751	90	9.946	91	10.145	92	10.347	92	59.120	
16	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio posyandu per satuan balita	1	1	70.648	1,5	74.180	2	77.889	2,5	81.784	3	85.873	3,5	90.167	3,5	480.542	
		Persentase pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	90	90		92		94		95		97		98		98		
		Persentase pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)	56	75		80		85		90		95		100		100		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
				Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(4)	(5)	(6)																
		Persentase pelayanan jaminan kesehatan di Fasilitas Kesehatan	90	90		92		94		96		98		100		100		
19	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peserta didik kelas I, VII dan X mendapat pemeriksaan kesehatan	97	75	1.677	80	1.761	85	1.849	90	1.941	95	2.038	100	2.140	100	11.407	
		Persentase Desa Siaga Aktif	60	60		60		66		72		76		80		80		
		Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS	65	65		70		75		80		85		90		90		
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,01	2,5	2.281	2	2.395	1,5	2.515	1	2.641	0,5	2.773	0,1	2.911	0,1	15.515	
		Persentase Balita gizi kurang (kurus) mendapat makanan tambahan	N/A	75		80		85		90		95		100		100		
		Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan	N/A	65		75		80		85		90		95		95		
		Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100		100		100		100		100		100		100		
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD	55	55	4.700	60	5.170	65	5.687	70	6.256	75	6.881	80	7.569	80	36.263	
		Persentase sarana air minum memenuhi syarat kesehatan	N/A	42		45		50		55		60		65		65		
		Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	75	75		80		85		90		95		100		100		
		Desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS)	47	57		67		77		87		97		107		107		
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi 0 - 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	92	92	7.565	93	8.322	94	9.154	95	10.069	96	11.076	97	12.184	97	58.369	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
				Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(4)	(5)	(6)																
		Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru BTA Positif	45	75		76		77		78		79		80		80		
		Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	N/A	15		18		20		24		30		35		35		
23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase hasil evaluasi kualitas SDM kesehatan	N/A	80	2.331	81	2.448	82	2.570	83	2.698	84	2.833	85	2.975	85	15.855	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	N/A	12		35		65		88		95		100		100		
		Angka jenis tenaga dokter dan paramedis difasilitas kesehatan sesuai standar	N/A	8		8		8		8		8		8		8		
25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Angka Puskesmas per satuan penduduk	3	3	15.497	3,5	17.047	4	18.751	4,5	20.627	5	22.689	5,5	24.958	5,5	119.569	
		Angka Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	10	10		10,5		11		11,5		12		12,5		12,5		
26	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Angka Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1	1	3.749	1	18.460	1	34.575	1	50.690	1	66.805	2	82.920	2	257.199	
29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif	39	42	671	45	692	48	713	51	734	54	756	57	779	57	4.345	
		Persentase pelayanan kesehatan anak balita	68	70		75		80		85		90		95		95		
30	Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	Persentase posyandu lansia aktif	75	75	228	80	239	85	251	90	264	95	277	100	291	100	1.551	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
				Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(4)	(5)	(6)																
32	Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KLH	5	24	4.697	22	5.167	17	5.683	12	6.252	7	6.877	2	7.565	2	36.240	
		Angka Kematian Ibu (AKI) 110 per 100.000 KLH	135	135		130		125		120		115		110		110		
		Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	91		92		93		95		96		97		97		
		Persentase komplikasi kebidanan dan neonatal yang ditangani di fasyankes	66	70		74		77		80		82		85		85		
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	79	80		81		83		85		86		87		87		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) sesuai standar minimal 4 kali (K4)	93	90		91		92		93		94		95		95		
		Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali	93	90		93		95		96		97		98		98		
					123.416		145.440		169.388		193.901		219.023		244.806		1.095.974	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN DINAS KESEHATAN

Kinerja adalah pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, sedangkan indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

7.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- 2) Identifikasi indikator dan target kinerja OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan menjadi pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dari indikator kinerja program (outcome) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis termasuk indikator kinerja utama untuk penetapan kinerja. Lebih jelas dan rinci indikator kinerja Dinas Kesehatan pada tabel 7.1 dan indikator kinerja mengacu pada sasaran dan tujuan RPJMD pada tabel 7.2 sedangkan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 7.3

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000	5	24	22	17	12	7	2
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000	135	135	130	125	120	115	110
3	Persentase balita gizi buruk	%	0,01	2,5	2	1,5	1	0,5	0,1
5	Rasio posyandu per balita	per 100	1	1	1,5	2	2,5	3	3,5
6	Rasio puskesmas per penduduk	per 100.000	3	3	3,5	4	4,5	5	5,5
7	Rasio puskesmas pembantu per penduduk	per 100.000	10	10	11	12	13	14	15
8	Rasio Rumah Sakit per penduduk	per 100.000	1	1	1	1	1	1	2
9	Rasio dokter per satuan penduduk :								
	Dokter umum	per 100.000	20	24	31	38	45	46	47
	Dokter spesialis	per 100.000	7	8	9	10	11	12	13
	Dokter gigi	per 100.000	9	10	11	12	13	14	15
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk :								
	Bidan	per 100.000	51	70	80	90	100	110	120
	Perawat	per 100.000	78	85	90	100	110	120	130
	Apoteker	per 100.000	2	2	4	6	8	10	12

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
	Ahli gizi	per 100.000	3	3	5	7	9	11	13
	Kesmas	per 100.000	6	6	8	10	12	14	16
	Sanitarian	per 100.000	2	2	4	6	8	10	12
11	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan	%	90	90	92	94	96	98	100
12	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan Puskesmas	%	90	90	92	94	95	97	98
13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	56	75	80	85	90	95	100
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 - 11 bulan	%	92	92	93	94	95	96	97
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	%	45	75	76	77	78	79	80
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	66	70	74	77	80	82	85
19	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	90	92	93	95	96	97
20	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan bayi	%	93	90	93	95	96	97	98

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Renstra Mengacu Pada Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Kinerja					
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000	5	24	22	17	12	7	2
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000	135	135	130	125	120	115	110
3	Persentase balita gizi buruk	%	2,5	2,5	2	1,5	1	0,5	0,1
4	Persentase balita status gizi kurang	%	9,5	9,5	9	8,5	8	7,5	7
5	Rasio posyandu per balita	per 100	1	1	1,5	2	2,5	3	3,5
6	Rasio puskesmas per penduduk	per 100.000	3	3	3,5	4	4,5	5	5,5
7	Rasio pustu per penduduk	per 100.000	10	10	11	12	13	14	15
8	Rasio Rumah Sakit per penduduk	per 100.000	1	1	1	1	1	1	2
9	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	N/A	12	35	65	88	95	100
10	Persentase Puskesmas memiliki peralatan kesehatan kesehatan sesuai standar	%	N/A	75	80	85	90	95	100
11	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	80	85	87	89	90	91	92
12	Persentase Fasilitas dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin	%	30	70	75	85	90	95	100
13	Persentase tenaga kesehatan yang dievaluasi pasca pelatihan	%	N/A	75	80	85	90	95	100
14	Persentase hasil evaluasi kualitas SDM kesehatan	%	N/A	80	81	82	83	84	85
15	Persentase tenaga dan sarana kesehatan dinilai tenaga kesehatan teladan	%	N/A	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Kinerja					
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Persentase Puskesmas yang menggunakan jaringan data komputasi	%	30	30	41	59	71	88	100
17	Rasio dokter per satuan penduduk :								
	Dokter umum	per 100.000	20	24	31	38	45	46	47
	Dokter spesialis	per 100.000	7	8	9	10	11	12	13
	Dokter gigi	per 100.000	9	10	11	12	13	14	15
18	Rasio tenaga medis per satuan penduduk :								
	Bidan	per 100.000	51	70	80	90	100	110	120
	Perawat	per 100.000	78	85	90	100	110	120	130
	Apoteker	per 100.000	2	2	4	6	8	10	12
	Ahli gizi	per 100.000	3	3	5	7	9	11	13
	Kesmas	per 100.000	6	6	8	10	12	14	16
	Sanitarian	per 100.000	2	2	4	6	8	10	12
19	Persentase pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan Makanan	%	N/A	80	82	84	86	88	90
20	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan program Perkesmas	%	N/A	65	70	75	80	85	85
21	Cakupan pelayanan kesehatan peserta jamkesmasda	%	N/A	75	80	85	90	95	100
22	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan	%	90	90	92	94	96	98	100
23	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan Puskesmas	%	90	90	92	94	95	97	98

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Kinerja					
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	56	75	80	85	90	95	100
25	Cakupan Puskesmas yang menerima Bantuan Operasional Puskesmas (BOK)	%	94	94	98	100	100	100	100
26	Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I, VII dan X	%	97	75	80	85	90	95	100
27	Cakupan promosi dan informasi media kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
28	Cakupan desa ber PHBS	%	65	65	70	75	80	85	85
29	Cakupan rumah tangga melaksanakan PHBS	%	65	65	70	75	80	85	90
30	Cakupan desa siaga Aktif	%	60	60	60	66	72	76	80
31	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan penyakit menular minimal 2%	%	N/A	3	5	7	9	11	13
32	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	%	N/A	65	75	80	85	90	95
33	Cakupan Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	%	21	75	80	85	90	95	100
34	Cakupan pertemuan integrasi program gizi, kia dan promkes	%	100	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
36	Cakupan rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD		55	55	60	65	70	75	80
37	Cakupan operasional laboratorium kesehatan lingkungan sesuai standar	%	N/A	75	80	85	90	95	100
38	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	N/A	42	45	50	55	60	65

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Kinerja					
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
39	Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	75	75	80	85	90	95	100
40	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS)	Desa/ Kel	47	57	67	77	87	97	107
41	Cakupan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) memenuhi syarat kesehatan	%	40	40	45	50	55	60	65
42	Cakupan tempat pengelola makanan dan minuman (TPM) memenuhi syarat kesehatan	%	20	20	25	30	35	40	45
43	Cakupan Puskesmas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	%	N/A	12	28	44	65	82	100
44	Cakupan anak murid kelas 1,2 dan 3 mendapatkan imunisasi	%	90	90	90	92	94	96	98
45	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 - 11 bulan	%	92	92	93	94	95	96	97
46	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	%	45	75	76	77	78	79	80
47	Cakupan penderita pneumoni pada balita yang ditemukan dan diobati	%	15	100	100	100	100	100	100
48	Cakupan penderita kusta baru tanpa cacat ditemukan	%	N/A	95	96	97	98	99	100
49	Cakupan penduduk usia 2 - 65 tahun minum obat POMP Filariasis	%	85	85	85	85	85	85	85
50	Cakupan penderita diare pada balita yang ditemukan dan diobati	%	71	100	100	100	100	100	100
51	Cakupan kasus HIV AIDs yang ditemukan mendapatkan obat anti retroviral	%	N/A	100	100	100	100	100	100
52	Cakupan kasus gigitan HPR mendapatkan vaksin VAR	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Kinerja					
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53	Cakupan kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
54	Cakupan Jemaah Calon Haji (JCH) yang dilakukan pemeriksaan kesehatan selama 3 bulan	%	100	100	100	100	100	100	100
55	Cakupan penderita malaria positif yang temukan	%	70	70	71	72	73	74	75
56	Cakupan penderita AFP kurang dari 2 per 100.000 penduduk		< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
57	Cakupan penemuan dan penanganan kasus campak		N/A	15	15	15	15	15	15
58	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
59	Cakupan penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	%	N/A	15	18	20	24	30	35
60	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	< 1	25	30	35	40	45	50
61	Cakupan kelompok lansia dibina	%	75	75	80	85	90	95	100
62	Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	39	42	45	48	51	54	57
63	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan anak balita	%	68	70	75	80	85	90	95
64	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	66	70	74	77	80	82	85
65	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	90	92	93	95	96	97
66	Cakupan pertolongan persalinan difasilitas kesehatan	%	79	80	81	83	85	86	87
67	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan bayi	%	93	90	93	95	96	97	98
68	Cakupan pelayanan antenatal care (ANC) ibu hamil minimal 4 kali (K4) sesuai standar	%	93	90	91	92	93	94	95

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Kinerja					
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
69	Cakupan Puskesmas melaksanakan P4K pada ibu hamil	%	N/A	24	41	65	80	88	95
70	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat	%	N/A	20	30	40	50	60	70
71	Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	%	N/A	40	50	60	70	80	90
72	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisiona	%	N/A	15	25	45	55	65	75
73	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	%	N/A	29	47	59	71	88	95
74	Cakupan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100
75	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
76	Cakupan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan	%	70	70	75	80	85	90	95
77	Cakupan peningkatan kinerja aparatur	%	90	90	91	92	93	94	95
78	Cakupan tertib administrasi barang milik daerah dinas kesehatan 100%	%	75	75	80	85	90	95	100
79	Cakupan laporan realisasi anggaran dan tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
80	Cakupan peningkatan kualitas penyusunan program	%	80	80	83	86	89	92	95
81	Cakupan nilai evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan dengan nilai BB	%	C	CC	CC	B	B	BB	BB
82	Cakupan peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan	%	80	90	91	92	93	94	95

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatkan fasilitas dan kualitas kesehatan masyarakat	1.1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	70.6	70.8	70.9	71.03	71.1	71.2
	1.2 Angka Kematian Bayi (AKB)	Kematian bayi usia 0 - 11 bulan dari seluruh populasi kelahiran hidup pada satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	per 1.000 KLH	24	22	17	12	7	2
	1.3 Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian ibu maternal dari seluruh populasi kelahiran hidup pada satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	per 100.000 KLH	135	130	125	120	115	110
	1.4 Prevalensi Penyakit Menular	Angka seluruh kasus penyakit TB Paru ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu	per 100.000 Pddk	85	83	81	79	77	75
	1.4.1 Angka Prevalensi Penyakit TB Paru								
	1.4.2 Angka Prevalensi Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)								
	1.4.3 Angka Prevalensi Penyakit HIV/AIDS (Persentase)								
	1.4.4 Angka Prevalensi Penyakit Malaria	Angka seluruh kasus penyakit Malaria ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu	per 1000	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1.5 Prevalensi Penyakit Tidak Menular									

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1.5.1	Angka Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi	Angka seluruh kasus penyakit tekanan darah tinggi yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu	per 1000 Pddk	35	32	29	27	25	23
	1.5.2	Angka Prevalensi Penyakit Kanker Serviks dan Payudara	Angka seluruh kasus penyakit kanker serviks dan payudara yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu	per 1000 Pddk	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	1.5.3	Angka Prevalensi Penyakit / Gangguan Jiwa	Angka seluruh kasus penyakit gangguan jiwa yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu	per 1000 Pddk	1	1	1	1	1	1
2. Meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan, serta perilaku hidup bersih dan sehat	2.1	Persentase penduduk memiliki Jaminan Kesehatan	Angka penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional terdaftar pada BPJS Kesehatan pada satu wilayah dalam waktu tertentu	%	23	31	59	68	79	91
	2.2	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Angka Desa yang telah melaksanakan deklarasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) pada satu wilayah dalam waktu tertentu	%	42	49	57	64	71	79
	2.3	Persentase Desa Ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Angka Jumlah Desa yang telah melaksanakan PHBS pada tatanan rumah tangga per tahun pada satu wilayah dalam waktu tertentu	%	65	70	75	80	85	85
	2.4 2.4.1	Persentase status gizi balita Persentase Gizi Baik pada Balita	Anak balita dengan status gizi baik berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U) dengan ambang batas normal (Z Score - 2 sampai dengan + 2)	%	90	91	91	92	92	93

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pada suatu wilayah dalam waktu tertentu							
	2.4.2 Persentase Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	Anak balita dengan status gizi kurang berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U) dengan ambang batas normal (Z-Score -3 smpai dengan < - 2) pada suatu wilayah dalam waktu tertentu	%	9.5	9	8.5	8	7.5	7.0
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	3.1. Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai terhadap hasil evaluasi dan penilaian atas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah pada perangkat daerah dalam waktu periode tertentu	Predikat	CC	CC	B	B	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perubahan perencanaan periode 5 (lima) tahunan sejak periode Tahun 2019 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Perubahan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pagu pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan pelaksanaan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2005 – 2025.

Rencana lima tahunan yang tertuang dalam perubahan Renstra merupakan pedoman penyusunan Renja, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan tersusunnya Renstra diharapkan nantinya pelaksanaan kegiatan dapat lebih tepat, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga arah pembangunan kesehatan lebih jelas sesuai Visi dan Misi serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Untuk melihat keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja telah ditetapkan, program dan kegiatan prioritas yang telah disusun melalui indikator kinerja utama sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Juli 2019



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS

dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Tingkat I
NIP. 19740220 200312 1 007